

**EVALUASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR
TRADISIONAL TERHADAP AKSESIBILITAS PEDAGANG
DAN PEMBELI**

(Studi pada Pasar Legi Kota Blitar)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

Oleh :

**EVI AGUSTINA M
NIM. 0910310215**



Dosen Pembimbing :

Dr. Mardiyono, MPA

Dr. Hermawan, S.IP, M.Si

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2013**

MOTTO

"Janganlah ingin seperti orang lain, kecuali seperti dua orang ini. Pertama orang yang diberi Allah kekayaan berlimpah dan ia membelanjakannya secara benar, kedua orang yang diberi Allah al-Hikmah dan ia berperilaku sesuai dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain"
(HR Bukhari)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul :EVALUASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR
TRADISIONAL TERHADAP AKSESIBILITAS PEDAGANG DAN
PEMBELI (STUDI PADA PASAR LEGI KOTA BLITAR)

Disusun oleh : EVI AGUSTINA M

NIM : 0910310215

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK

Konsentrasi :-

Maiang, 23 Juli 2013

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Mardiyono, MPA

Dr. Hermawan, S.IP, M.Si

NIP. 19520523 197903 1 001

NIP. 19720405 200312 1 001

TANDA PENGESAHAN

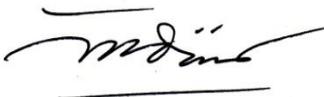
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada :

Hari : Senin
 Tanggal : 29 Juli 2013
 Jam : 10.00 WIB
 Skripsi atas nama : Evi Agustina M
 Judul : Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Aksesibilitas Pedagang dan Pembeli (Studi pada Pasar Legi Kota Blitar)

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



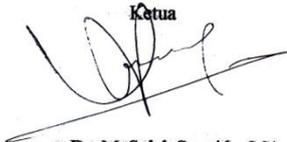
Dr. Mardiyono, MPA
 NIP. 19520523 197903 1 001

Anggota



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
 NIP. 19720405 200312 1 001

Ketua



Dr. M. Saleh Soeaidy, MA
 NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota



Ike Wanusmawati, S.Sos, MAP
 NIP. 19770101 200502 2 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 24 Juli 2013

Mahasiswa



Evi Agustina M

0910310215

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Aksesibilitas Pedagang dan Pembeli (Studi pada Pasar Legi Kota Blitar).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Mardiyono, MPA serta Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan doa dan membantu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibunda dan adik tercinta, keluarga besar Titi FC, serta teman-teman terbaik yang telah memberikan semangat dan doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Arianto, S.Sos, M.Si, selaku Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar serta seluruh staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Malang, Juli 2013

Penulis

RINGKASAN

Evi Agustina M, 2013, **Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Aksesibilitas Pedagang dan Pembeli (Studi pada Pasar Legi Kota Blitar)**. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Tim Pembimbing: Dr. Mardiyono, MPA, Dr. Hermawan, S.IP, M.Si 123 Hal + xiv

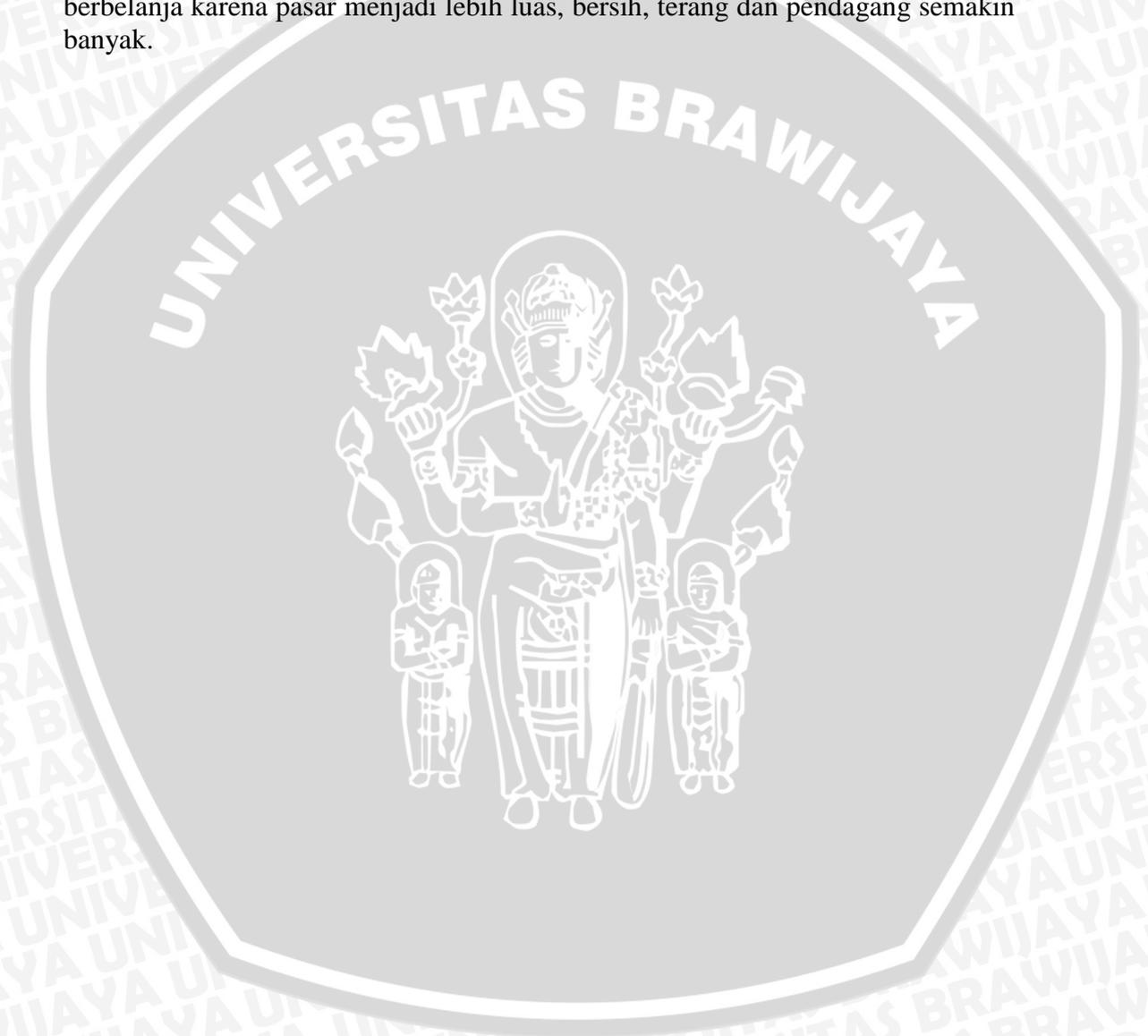
Penelitian ini dilakukan di Pasar Legi Kota Blitar sebagai lokasi revitalisasi. Tujuan kebijakan revitalisasi adalah meningkatkan PAD, meningkatkan pendapatan pedagang dan meningkatkan pelayanan kepada pedagang dan pembeli. Kebijakan tersebut tentunya memberikan dampak pada aksesibilitas pedagang dan pembeli. Dampak yang ditimbulkan adalah dampak positif dan dampak negatif. Untuk itu perlu adanya evaluasi implementasi kebijakan revitalisasi pasar pada Pasar Legi Kota Blitar.

Dampak dari kebijakan revitalisasi menimbulkan beberapa pertanyaan. Bagaimanakah implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Legi terhadap aksesibilitas pedagang dan pembeli, apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi Pasar Legi. Berdasarkan evaluasi, bagaimanakah efektifitas kebijakan revitalisasi Pasar Legi terhadap aksesibilitas pedagang dan pembeli.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan lokasi penelitian di wilayah Kota Blitar dengan menetapkan situs penelitian di Pasar Legi dan Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar. Sumber data diperoleh melalui wawancara serta dokumen-dokumen yang terkait dengan informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrument penunjang penelitian adalah peneliti sendiri dengan instrument penunjang wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif dengan dilengkapi uji keabsahan data.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan koordinasi antara Kantor Pengelolaan Pasar Daerah, Dinas Kebersihan Pasar, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian Kota Blitar. Setelah revitalisasi, pasar menjadi lebih luas, terang dan bersih serta ditempati oleh 1.720 pedagang, 791 kios dan 929 los. Dengan revitalisasi tercipta fasilitas penunjang baru yaitu radio pasar, musholla, CCTV, MCK, pos kesehatan, informasi dan pos keamanan. Dalam pelaksanaan kebijakan, sumberdaya manusia yaitu para staff dari setiap instansi yang berkoordinasi dapat bekerja dengan baik dalam mengelola pasar dan diikuti oleh baiknya etika pedagang sehingga memudahkan Kantor Pengelolaan Pasar Daerah dalam mengatur pasar. Hambatannya adalah sulitnya mengatur koordinasi dengan pedagang dalam mengatasi masalah kurangnya minat pembeli pada pedagang kecil dan sulitnya memperoleh anggaran dalam memperbaiki fasilitas pasar yang mulai rusak.

Pedagang dengan modal besar dapat menikmati fasilitas baru dari revitalisasi yaitu kios yang luas, terang, bersih dan didukung dengan posisi kios yang mudah dijangkau oleh pembeli sehingga pedagang semakin mudah menarik pembeli, namun pedagang dengan modal kurang besar merasa fasilitas baru tidak berbeda dengan fasilitas pada pasar lama, kios pedagang tersebut berukuran tidak besar dengan jarak yang sempit dan penerangan yang kurang memadai. Tempat kios tersebut berada di tengah pasar dan bagian lantai 2 pasar. Tapi pembeli merasa jika fasilitas penunjang dalam pasar membuat pembeli semakin nyaman berbelanja karena pasar menjadi lebih luas, bersih, terang dan pedagang semakin banyak.



SUMMARY

Evi Agustina M, 2013, **Implementation of Revitalization Policy Evaluation in Traditional Market to Accessibility Seller and Bayer (Study at Pasar Legi Blitar)**. Public Administration. Faculty of Administrative Science Brawijaya University. Supervisor: Dr. Mardiyono, MPA. Co. Supervisor: Dr. Hermawan, S.IP, M.Si. 123 Page +xiv

The research was conducted in Pasar Legi, as revitalization locations. Revitalization policy goal is to increase revenue, income seller and improve service to seller and buyers. Revitalization market can give positive and negative impact. Need for an evaluation to determine the effectiveness of the policy on accessibility seller and buyers.

Impact of revitalization policy can many question. First how the implementation of revitalization policies Pasar Legi for accessibility seller and buyers. Second What are the supporting and obstacles factors that arise in the implementation of the revitalization of Pasar Legi. From evaluation, How effective of implementation revitalization policy evaluations for accessibility Pasar Legi seller and buyers.

The Results of the study showed that the implementation of policies involving coordination between the Office of the Regional Market Management, Market Sanitation Department, Transportation Department, Health Department, and the government Police. After revitalization, the market becomes more spacious, bright, clean, and is occupied by 1.720 seller, 791 kiosks and 929 los. With the revitalization of new support facilities are created radio market, mosque, CCTV, toilets, health posts, information and security posts. In implementing the policy, human resources, namely the staff of every agency that can coordinate work well in managing the market and good ethics followed by seller to facilitate Regional Market Management Office in regulating the market. The obstacle is the difficulty to set up coordination with seller through of problem to minimum interest of buyer on small seller and the difficulty of getting the budget in repairing damaged bad facility in market.

Seller with large capital can enjoy the new facilities of revitalization the big kiosks, bright, clean and get good position, so the buyers more easier extend to buy. But seller with small capital have feel new facility not different with last facility. The seller get small kiosk and the middle market and the place on the 2nd floor. And now buyers have feel when supporting facilities in the market to make buyers more comfortable shopping as the market becomes big palace, clean, bright and many seller.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	i
SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kebijakan Publik.....	15
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	15
2. Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan Publik.....	16
3. Implementasi Kebijakan.....	19
a. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	19
b. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	22
c. Faktor-faktor Keberhasilan Kegagalan Implementasi Kebijakan ..	27
4. Evaluasi Kebijakan.....	32
a. Pengertian dan Fungsi	32
b. Tipe dan Kriteria.....	36
B. Ekonomi Politik	38
1. Pengertian.....	38
2. Pilihan Publik	40
3. Mekanisme Pasar	41
C. Revitalisasi	42
1. Pengertian.....	42
2. Teori Revitalisasi dan Rancang Kota	43
D. Aksesibilitas Sektor Perdagangan.....	44



BAB III METODE PENELITIAN46

A. Jenis Penelitian.....46
 B. Fokus Penelitian47
 C. Lokasi dan Situs Penelitian48
 D. Jenis dan Sumber Data48
 E. Teknik Pengumpulan Data50
 F. Instrumen Penelitian.....51
 G. Analisis Data51
 H. Uji Keabsahan Data.....54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN56

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....56
 1. Gambaran Umum Perkembangan Kota Blitar56
 2. Kondisi dan Gambaran Umum Pasar Legi Kota Blitar66
 B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....69
 1. Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Legi Kota Blitar69
 a. Aktor-aktor Pelaksana Kebijakan69
 b. Kondisi Pasar dan Pedagang Pasar Legi73
 c. Komunikasi yang Dilakukan Oleh Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar dan Penataan Pedagang76
 2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi Pemerintah Kota Blitar dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar pada Pasar Legi Kota Blitar78
 a. Faktor Pendukung78
 b. Faktor Penghambat.....80
 3. Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Legi Terhadap Aksesibilitas Pedagang dan Pembeli.....83
 a. Dampak Pedagang.....83
 b. Dampak Masyarakat.....86
 c. Dampak Organisasional89
 d. Dampak Fisik91
 C. Analisis dan Interpretasi Data93
 1. Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Legi Kota Blitar93
 a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan93
 b. Sumber Daya.....94
 c. Kondisi Lingkungan Ekonomi dan Lingkungan Sosial Pasar Legi97
 d. Komunikasi dan Koordinasi yang Dilakukan Oleh Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar dan Penataan Pedagang100
 2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar pada Pasar



Legi Kota Blitar.....	103
a. Faktor Internal Pendukung Implementasi Kebijakan.....	103
b. Faktor Eksternal Pendukung Implementasi Kebijakan.....	105
c. Faktor Internal Penghambat Implementasi Kebijakan.....	107
d. Faktor Eksternal Penghambat Implementasi Kebijakan.....	108
3. Hasil Evaluasi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Legi terhadap Aksesibilitas Pedagang dan Pembeli.....	109
a. Dampak Kebijakan.....	109
1) Dampak Individu.....	110
2) Dampak Masyarakat.....	112
3) Dampak Organisasional.....	113
4) Dampak Fisik.....	114

BAB V PENUTUP.....117

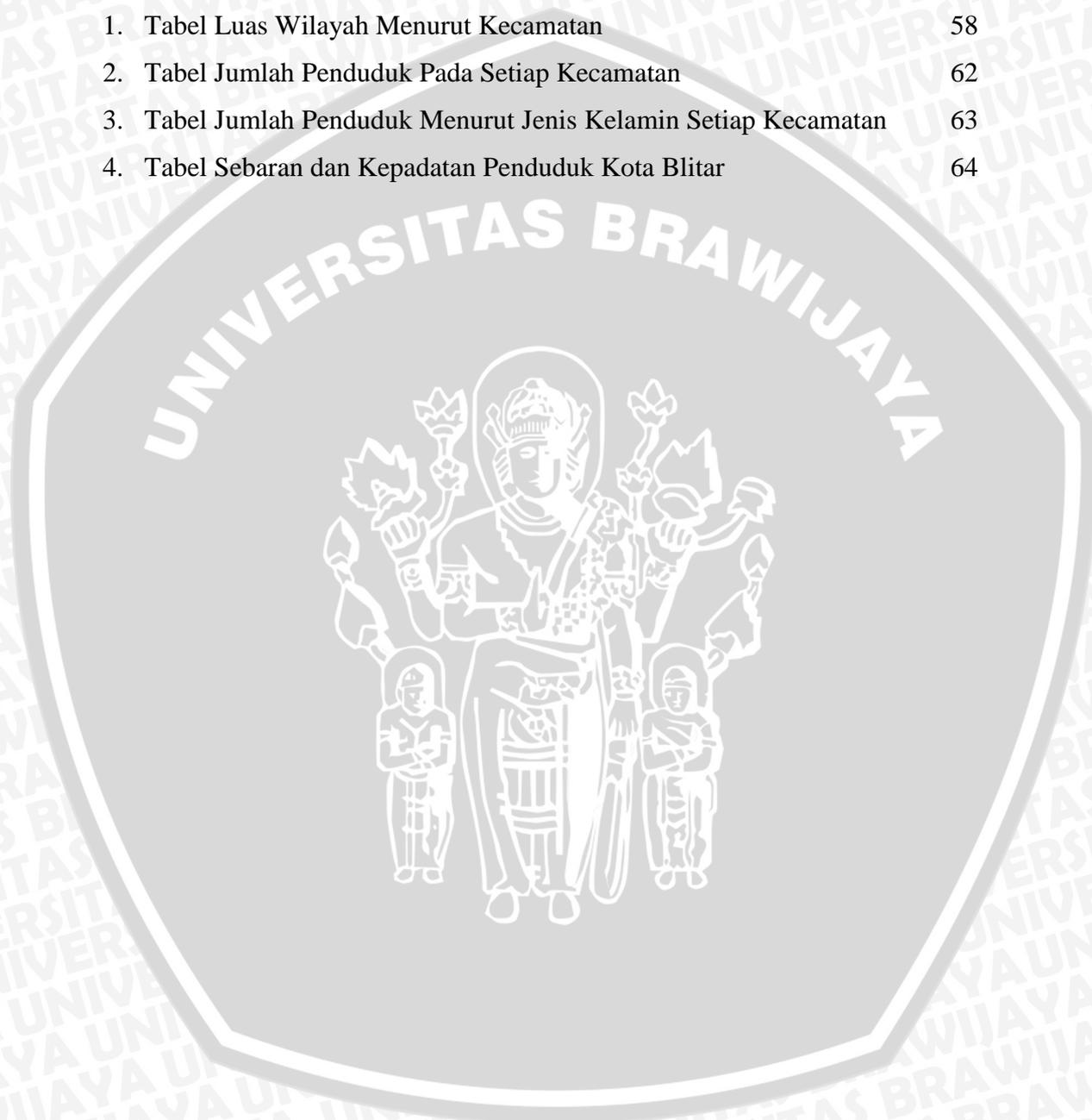
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA



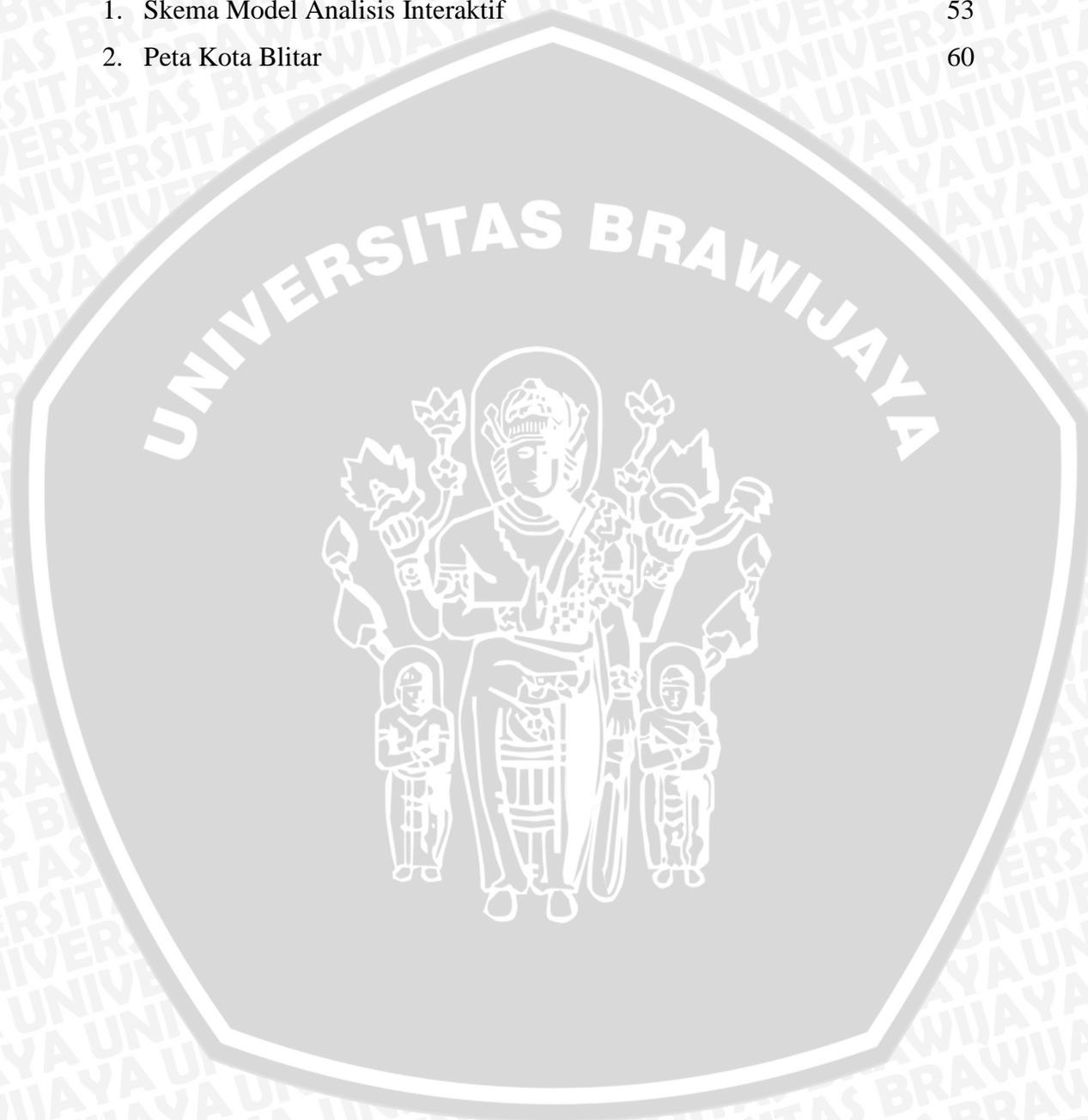
DAFTAR TABEL

No. Judul	Halaman
1. Tabel Luas Wilayah Menurut Kecamatan	58
2. Tabel Jumlah Penduduk Pada Setiap Kecamatan	62
3. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Setiap Kecamatan	63
4. Tabel Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Blitar	64



DAFTAR GAMBAR

No. Judul	Halaman
1. Skema Model Analisis Interaktif	53
2. Peta Kota Blitar	60



DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Foto Pasar Legi
2. Pedoman Wawancara
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Surat Keterangan Melakukan Penelitian
6. Data Gambaran Pasar Legi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu Negara pasti terdapat pemerintahan yang di dalamnya mengatur urusan-urusan Negara. Salah satu urusan Negara yang terpenting adalah masalah kebijakan dan perekonomian. Kebijakan merupakan suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat (Wahab, 2001:5). Berkaitan dengan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa perekonomian selalu menjadi urusan pemerintah yang sangat berpengaruh pada warga negaranya.

Kebijakan dan perekonomian adalah dua bahasan yang memiliki keterkaitan. Anderson dalam Islamy menyatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok dalam memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 2001:17), dari pengertian tersebut, berarti dimana setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah merupakan awal dari proses tercapainya perekonomian yang bertujuan menyejahterakan setiap warga Negara.

Perekonomian mempengaruhi segala segi kehidupan masyarakat mulai dari politik, pendidikan dan pemerintahan. Keadaan perekonomian yang belum memberikan kesejahteraan sepenuhnya pada setiap warga negara menjadi timbul

permasalahan yang harus terselesaikan. Perekonomian tentunya berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan dibuat untuk memperbaiki keadaan ekonomi di Indonesia. Tentunya kebijakan dalam masalah perekonomian dimulai dari kebijakan pada pembangunan perekonomian di daerah. Pembangunan merupakan perwujudan dari proses implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan kebijaksanaan (Wahab, 2001:64).

Kebijakan memberikan petunjuk pada landasan dasar kerja pembangunan yang memberikan arahan bagi penerapan tujuan-tujuan pembangunan melalui program-program dan proyek. Secara teoritik pengertian pembangunan adalah proses usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Suryono, 2006:2), sehingga pembangunan tentunya menjadi perubahan ke arah positif, intinya pembangunan dilakukan untuk memberikan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Pencapaian pembangunan tentunya dilakukan secara bertahap dan terus menerus sehingga tercapai tujuan pembangunan secara maksimal. Untuk mencapai pembangunan dengan hasil yang maksimal, peran serta masyarakat sangat diperlukan seperti yang tertuang pada UU No.25 pasal 2 tahun 2004 tentang optimalisasi peran serta masyarakat dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), karena masyarakat berperan sebagai kawasan dan subyek dari pembangunan terutama pembangunan sektor fisik seperti jalan, pengelolaan tata ruang dan pemukiman yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pembangunan daerah yang

berkaitan langsung dengan masyarakat salah satunya adalah pembangunan ekonomi melalui pasar.

Minat masyarakat terhadap pasar sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia, karena pendapatan dari pasar seperti retribusi akan mempengaruhi PAD seperti yang tertuang dalam UU No.33 tahun 2004 tentang pendapatan asli daerah. Masalah alokasi potensi daerah seperti pasar tentunya berhubungan dengan ekonomi politik, Staniland dalam Deliarnov (2006:8) menjelaskan bahwa ilmu ekonomi politik “mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial: hubungan antara politik dan ekonomi. Isu ini memiliki dua sisi baik eksplanatori maupun normatif. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling terkait dan mengenai bagaimana seharusnya mereka terkait”. Ekonomi politik merupakan cabang ilmu sosial yang kemudian berkembang menjadi ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan negara dan peningkatan sumber daya negara. Melalui pasar, kepentingan ekonomi muncul pada salah satu sasaran kebijakan yaitu meningkatkan pendapatan daerah. Kepentingan politik muncul dengan adanya pinjaman kepada daerah sebagai sumber dana pembangunan pasar.

Pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional saat ini mulai ditinggalkan oleh konsumen yaitu masyarakat, banyak masyarakat yang menganggap bahwa pasar tradisional cenderung kumuh seperti yang dijelaskan Legowo bahwa pasar tradisional dipandang mengganggu kebersihan dan ketertiban kota, pasar tradisional terkesan kumuh dan kotor. Sehingga minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional menurun, dengan

turunnya minat masyarakat terhadap pasar tradisional tentunya akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Melihat keadaan tersebut, pemerintah mulai menjadikan fenomena tersebut sebagai suatu permasalahan yang harus masuk dalam agenda permasalahan pemerintah dan wajib mendapatkan pemecahan melalui kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan tahapan perumusan kebijakan yang dijelaskan oleh Dunn dalam Winarno (2005:28) yaitu tahap pertama adalah tahap penyusunan agenda dimana pejabat yang telah dipilih harus menetapkan permasalahan yang perlu difokuskan pembahasannya. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah keputusan untuk membangun ataupun meremajakan pasar tradisional yang lebih tertata dan lebih menonjolkan kebersihan menjadi prioritas yang dapat menarik kembali minat konsumen untuk berbelanja di pasar. Namun kebijakan pembangunan pasar tersebut tetap tidak mengahapus tradisi dan kekhasan pasar tradisional. Dengan kebijakan pembangunan pasar yang diambil oleh pemerintah, pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perdagangan yang ada sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan semestinya.

Hal tersebut terjadi pula di Kota Blitar. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kota Blitar Tahun 2001-2010 mengenai pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pasar Legi sebagai pasar induk dan pusat distribusi barang dan tahapan pembangunan Kota Blitar, Pemerintah Daerah Kota Blitar mengadakan pembangunan dan perubahan pada beberapa fasilitas umum yang ada di Kota Blitar. Pembangunan daerah yang



berkaitan dengan peningkatan perekonomian dimulai dengan peningkatan minat masyarakat terhadap pasar tradisional yaitu melalui sektor perdagangan. Sektor perdagangan yang diminati oleh masyarakat Blitar adalah pasar.

Kota Blitar memiliki beberapa pasar tradisional yang menjadi pusat perekonomian masyarakat Blitar baik dari wilayah kota maupun kabupaten. Salah satu pasar tersebut adalah pasar Legi, namun bentuk bangunan pasar dan fasilitas yang ada sangat tidak layak digunakan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Blitar mengambil kebijakan untuk merevitalisasi Pasar Legi menjadi pasar tradisional yang lebih modern dengan harapan dapat lebih menumbuhkan minat masyarakat terhadap perdagangan pasar sehingga meningkatkan aksesibilitas perdagangan dan pembeli dapat dinikmati oleh masyarakat.

Peningkatan aksesibilitas perdagangan dan pembeli yang diupayakan pemerintah adalah melalui revitalisasi pasar. Revitalisasi merupakan upaya untuk melakukan perbaikan (pementingan) dari beberapa kekurangan yang ada dan diketahui sebelumnya (Rahman, 2009). Sehingga revitalisasi pasar dapat diartikan sebagai proses perbaikan fasilitas fisik masyarakat yang diketahui memiliki kekurangan dan diupayakan menjadi sarana fasilitas fisik masyarakat yang penting. Proses revitalisasi Pasar Legi memakan waktu satu tahun, pada tahun 2003 Pasar Legi yang sebelumnya merupakan pasar tradisional yang memiliki bangunan yang sudah tidak memadai menjadi pasar tradisional yang lebih modern dan nyaman untuk digunakan baik untuk pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen. Namun dengan direvitalisasinya Pasar Legi tentu memberi dampak pada aksesibilitas pedagang dan pembeli yang ada. Dengan mengimplementasikan

kebijakan revitalisasi pasar diharapkan memberikan dampak terhadap berkembangnya aksesibilitas pedagang dan pembeli serta pendapatan asli daerah.

Aksesibilitas pedagang dan pembeli merupakan bagian dari proses pemenuhan fasilitas dan kenyamanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah, dengan adanya Pasar Legi saat ini yang lebih memiliki kelayakan untuk beroperasi dalam sektor pedangan. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan proses implementasi kebijakan pemerintah dan tentunya diharapkan memiliki dampak positif terhadap aksesibilitas pedagang dan pembeli. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pedagang pakaian yang kiosnya terletak dibagian depan pasar lantai 1 bernama Ratna bahwa:

“Bangunan yang sekarang lebih enak, terang dan lebih longgar. Jualan jadi lebih mudah.”(Wawancara pada tanggal 1 Juni 2013 pada pukul 10.00 WIB bertempat di kios pakaian Ratna Busana dalam Pasar Legi).

Pernyataan pedagang dari wawancara tersebut tentang kemudahan berdagang dan fasilitas penunjang pedagang Pasar Legi yang bertempat di kios depan tersebut memperlihatkan bahwa pedagang dengan kios yang terletak di lantai satu dan terletak di muka pasar lebih diminati oleh pembeli, namun minat masyarakat tidak terjadi pada kios yang terletak di belakang dan lantai 2. Sebagaimana yang dikatakan oleh karyawan kios pakaian pada lantai 2 bahwa:

“Dulu waktu pasar masih bangunan lama kios kita ada di depan jadi jualannya laris, sekarang kiosnya dapat di dalam pasar jadi ya kalah sama yang lain.” (Wawancara pada tanggal 1 Juni 2013 pada pukul 11.00 WIB bertempat di kios pakaian Gaul dalam Pasar Legi).

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa fasilitas yang diberikan melalui revitalisasi tidak menarik minat masyarakat pada pasar lantai 2. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Arianto, S.Sos,

M.Si dalam Koranrakyat bahwa masih banyak kios kosong atau tak berpenghuni khususnya pada lantai II karena pedagang mengeluh sepi pengunjung. Badan Perencanaan Daerah Kota Blitar menyatakan bahwa tahun 2012 PAD dari Pasar Legi tidak dapat mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Seperti keterangan dari Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar Arianto, S.Sos, M.Si. bahwa:

“Target PAD dari Pasar Legi khusus untuk pendapatan sewa kios dan los pada tahun 2012 memang belum dapat mencapai target. Tahun kemarin baru sampai 35 persen, tapi kami selalu mengusahakan pencapaian target tersebut seperti mengusahakan pemenuhan kios yang kosong dan untuk menarik minat pembeli di lantai 2 pasar”. (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2013 pada pukul 11.30 WIB bertempat di ruang Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar)

Dari pernyataan tersebut muncul pertanyaan besar bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi pasar tersebut sebagai upaya mewujudkan perkembangan sektor perdagangan. Peremajaan pasar tradisional yang diharapkan dapat meningkatkan kelancaran perdagangan dan meningkatkan minat pembeli masih dipertanyakan dengan adanya masalah masih banyaknya kios yang tidak berpenghuni dan kotor serta minat pembeli yang lebih tertarik berbelanja pada kios bagian luar pasar. Masalah yang timbul setelah revitalisasi pasar tersebut bisa ditimbulkan karena beberapa variabel seperti yang dijelaskan Edward dalam Wahab (2001:78-92) bahwa sumber daya manusia, koordinasi, dan komunikasi mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Proses implementasi kebijakan yang memiliki beberapa permasalahan yaitu pada variabel sumber daya manusia, koordinasi, dan komunikasi nampaknya juga terjadi di Thailand. Namun sedikit berbeda, jika Kota Blitar implementasi

kebijakan pada revitalisasi pasar maka Thailand khususnya Phuket implementasi kebijakan pada pariwisata. Oratai Krutwaysho (2003:1) menjelaskan :

“Phuket, Thailand is chosen as a case study for policy implementation research due to its developing world context. As multi-sectors are usually involved, tourism policies frequently confront many challenges, especially in developing countries where shortages of qualified personnel and inadequate finance are regularly found. The nature of the policy process generally requires a clear structure and instruction with sufficient resources for a policy to be realistic. Issues of coordination, obedience and communication arise in the implementation process (Phuket, Thailand dipilih sebagai studi kasus untuk penelitian implementasi kebijakan karena konteks negara berkembang nya. Sebagai multi-sektor yang biasanya terlibat, kebijakan pariwisata sering menghadapi banyak tantangan, terutama di negara-negara berkembang di mana kekurangan personil yang berkualitas dan keuangan yang tidak memadai secara teratur ditemukan. Sifat dari proses kebijakan umumnya membutuhkan struktur yang jelas dan instruksi dengan sumber daya yang cukup untuk kebijakan yang realistis. Masalah koordinasi, ketaatan dan komunikasi muncul dalam proses implementasi).”

Proses implementasi berdasarkan jurnal tersebut diketahui menimbulkan beberapa masalah sehingga tujuan kebijakan tidak sesuai sasaran. Hal tersebut dilakukan pada penelitian implementasi kebijakan revitalisasi pada Pasar Legi, dimana dengan adanya penelitian implementasi variabel yang mungkin menyebabkan kebijakan tidak sesuai sasaran dapat diketahui. Untuk mengetahui bagaimana pencapaian target revitalisasi pasar dan efektifitas kebijakan tersebut, maka perlu adanya evaluasi kebijakan yaitu berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan yang merupakan tahapan terakhir dalam proses perumusan kebijakan. Wibawa (1994: 9-10) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 aspek yaitu proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampak kebijakan.

Evaluasi terhadap aspek implementasi disebut evaluasi implementasi sedangkan evaluasi terhadap aspek konsekuensi dan efektifitas dampak disebut evaluasi dampak kebijakan. Abidin (2006:13) lebih lanjut mengemukakan bahwa informasi yang dihasilkan dari evaluasi merupakan nilai (*value*) yang antara lain berkenaan dengan efisiensi (*efficiency*), yakni perbandingan antara hasil dengan biaya, atau (hasil/biaya); keuntungan (*profitability*), yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil/biaya); efektif (*effectiveness*), yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya; keadilan (*equity*), yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan); *detriments*, yakni indikator negatif dalam bidang sosial seperti kriminal dan sebagainya; manfaat tambahan (*marginal rate of return*), yaitu tambahan hasil banding biaya atau pengorbanan (*change-in benefits/change -in-cost*). Dalam konteks penelitian ini yaitu kebijakan revitalisasi pasar tradisional, maka evaluasi implementasi kebijakan diperlukan untuk menilai dan mengetahui sampai sejauh mana keluaran dari kebijakan dan efektifitas sebuah kebijakan publik bisa dipertanggungjawabkan yaitu mencapai tujuan pemenuhan aksesibilitas pedagang dan pembeli.

Berkaitan dengan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Aksesibilitas Pedagang dan Pembeli” (Studi pada Pasar Legi Kota Blitar).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Legi terhadap aksesibilitas pedagang dan pembeli?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Legi?
3. Bagaimanakah evaluasi kebijakan revitalisasi Pasar Legi terhadap aksesibilitas pedagang dan pembeli?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan, menganalisis, serta menginterpretasikan implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Legi di kota Blitar.
2. Untuk mendiskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah kota Blitar dalam implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Legi.
3. Untuk mendiskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan efektifitas kebijakan revitalisasi pasar Legi terhadap aksesibilitas pedagang dan pembeli.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan nilai dan kontribusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai adalah antara lain :

1. Kontribusi Akademis

a. Bagi Mahasiswa

1. Penelitian ini dapat meningkatkan respon mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah sekaligus untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi peneliti lain sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya, serta dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.

b. Bagi Perguruan Tinggi

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian tentang kebijakan.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Blitar tentang efektifitas kebijakan pembangunan revitalisasi pasar terhadap berjalannya sektor perdagangan

sehingga pemerintah dapat mencapai tujuan pembangunan sektor perdagangan sesuai sasaran.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat akan implementasi kebijakan pada pencapaian peningkatan aksesibilitas pedagang dan pembeli.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terbagi menjadi lima sub bab, pertama dalam latar belakang dijabarkan tentang hubungan kebijakan dengan pembangunan daerah, kemudian menjelaskan tentang kebijakan revitalisasi pasar serta permasalahan yang timbul sehingga perlu adanya evaluasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional terhadap dampak aksesibilitas pedagang dan pembeli. Kedua terdapat rumusan masalah yaitu implementasi kebijakan, faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar, serta evaluasi kebijakan yang berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan. Ketiga disajikan tujuan penelitian meliputi deskripsi implementasi kebijakan, pendukung dan kendala dalam revitalisasi pasar tradisional, serta evaluasi implementasi kebijakan. Keempat, kontribusi penelitian yang meliputi kontribusi secara akademis dan praktis.

Kelima, sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan landasan teori dari penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam tinjauan pustaka meliputi kebijakan publik yang didalamnya juga terdapat implementasi kebijakan serta evaluasi kebijakan. Selain itu, teori yang berhubungan dengan rumusan masalah yang ada meliputi ekonomi politik, revitalisasi, dan aksesibilitas sektor perdagangan. Teori tersebut dipilih karena teori-teori tersebut berhubungan dengan fokus dari penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di Pasar Legi Kota Blitar dan Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar. Fokus penelitian meliputi proses implementasi kebijakan revitalisasi, faktor pendukung dan penghambat kebijakan, dan evaluasi kebijakan revitalisasi yang berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah peneliti itu sendiri dengan menyaksikan, mengamati, serta mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan objektif. Serta analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari empat sub bab.

Pertama, akan menguraikan tentang gambaran umum perkembangan Kota Blitar (sejarah perkembangan Kota Blitar, kondisi geografi, dan kondisi demografis), Kedua, menguraikan tentang kondisi dan gambaran umum Pasar Legi Kota Blitar. Ketiga, menguraikan penyajian data hasil penelitian yang terdiri dari implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Legi di Kota Blitar, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, serta dampak kebijakan tersebut. Keempat, analisis dan interpretasi data yang telah dideskripsikan dalam penyajian data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini peneliti mendeskripsikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai implementasi kebijakan revitalisasi pasar pada Pasar Legi Kota Blitar, faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, serta keefektifan kebijakan revitalisasi pasar tradisional terhadap aksesibilitas pedagang dan pembeli. Selain itu peneliti juga akan mendiskripsikan saran yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Kota Blitar serta pihak-pihak lain yang terkait.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan langkah atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau penyelenggara Negara sebagai pedoman dan acuan tercapainya tujuan yang diharapkan. Anderson dalam Islamy menyatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok dalam memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 2001:17).

Laswell dan Caplan seperti dikutip oleh Islamy (Islamy, 2001:15-17) mengemukakan bahwa kebijakan adalah *a project program of a goal, value, and practice*. Menurut Chief J.O. Udoji dalam Abdul Wahab (2001:5), yakni bahwa

definisi kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Pengertian kebijakan yang telah diungkapkan oleh pakar-pakar diatas pada umumnya tidak jauh berbeda. Dari pengertian kebijakan diatas seperti yang diungkapkan oleh Anderson dalam Islamy bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok dalam memecahkan suatu masalah

tertentu (Islamy, 2001:17). Jadi kebijakan merupakan suatu keputusan yang diwujudkan dengan tindakan dan dihasilkan dengan pemecahan masalah.

Masih banyak pengertian-pengertian tentang kebijakan publik menurut beberapa ahli. Namun dari pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat perbedaan yang mendalam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada intinya kebijakan publik memuat beberapa tindakan penting yaitu a) penemuan masalah, b) perumusan kebijakan, c) pengesahan kebijakan, d) implementasi kebijakan, dan e) evaluasi kebijakan. Seperti dalam penelitian ini, inti kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan menjadi fokus penelitian mengenai kebijakan revitalisasi Pasar Legi di Kota Blitar.

2. Tahap-tahap Perumusan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu tindakan penting dan rumit yang harus dilakukan oleh pemerintah setelah terdapat permasalahan yang

menyangkut pemerintahan. Proses perumusan kebijakan melibatkan banyak variabel yang harus dikaji secara mendalam. Perumusan kebijakan publik tentunya melalui beberapa tahap seperti yang dijelaskan oleh Dunn dalam Winarno (2005:28-30) :

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda kebijakan. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternative/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan



Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawahan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumberdaya financial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementator), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditetapkanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.



Untuk mencapai suatu rumusan kebijakan yang bertanggung jawab, setiap aktor-aktor perumusan kebijakan harus melalui lima tahapan tersebut. Tahapan-tahapan harus dilakukan juga untuk mengolah input-input politik menjadi output-output politik. Melalui tahapan tersebut masyarakat awam akan lebih mudah menerjemahkan setiap kebijakan dan tentunya dapat diketahui seberapa berhasil kebijakan tersebut sesuai pada sasaran yang diharapkan. Seperti apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar, dengan melihat kondisi perdagangan dan keadaan Pasar Legi maka pemerintah dengan selektif melalui lima tahapan tersebut sehingga tercipta kebijakan revitalisasi pasar dan pada saat ini dapat diketahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut.

3. Implementasi Kebijakan

a) Pengertian Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya tidak ada suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah kebijakan yang sempurna. Namun dari setiap kebijakan yang diputuskan selalu diharapkan tercapainya tujuan yaitu pemecahan masalah yaitu masalah dalam masyarakat yang tidak merugikan semua pihak atau jika memang harus merugikan salah satu pihak, kerugian tersebut dapat diminimalisir. Suatu kebijakan akan dikatakan berhasil apabila penerapan kebijakan tersebut sesuai sarapan atau tujuan dari penetapan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting, karena implementasi kebijakan tersebutlah dapat dilihat apakah kebijakan tersebut tepat sasaran ataukah salah sasaran.



Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:145), menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas dan program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau sejenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Sehingga implementasi mencakup beberapa macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang menjalankan program, bertanggung jawab untuk menyediakan sumber-sumber yang diperlukan, untuk implementasi program tersebut. Sumber-sumber tersebut meliputi personil, peralatan, lahan tanah dan terutama dana (uang). Kedua, badan-badan pelaksana membuat rencana-rencana kegiatan dan regulasi agar program menjadi suatu arahan yang kongkrit. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka, menciptakan unit-unit birokrasi untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Sehingga pada akhirnya kegiatan yang dilaksanakan dapat membawa dampak nyata kepada masyarakat sasaran kebijakan.

Senada dengan Ripley dan Franklin, menurut Daniel A. Sabatier dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2001:65), bahwa makna implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara baik usaha-usaha yang mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari definisi-definisi mengenai implementasi kebijakan diatas, pada dasarnya terdapat tiga hal penting dalam implementasi kebijakan: 1) adanya

tujuan atau sasaran kegiatan; 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; 3) adanya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan pemerintah umumnya tidak hanya melibatkan satu lembaga atau organisasi saja, namun melibatkan beberapa organisasi atau organisasi pemerintahan. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya berbagai pandangan mengenai sebuah implementasi kebijakan. Terdapat tiga sudut pandang mengenai implementasi kebijakan yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan, dan kelompok sasaran yang masing-masing memiliki fokus analisis implementasi kebijakan yang berbeda. Fokus dari pembuat kebijakan adalah kepatuhan dari lembaga di bawahnya dalam mencapai tujuan kebijakan dan tingkat ketercapaian tujuan kebijakan. Sedangkan fokus dari pejabat di lapangan adalah meminimalisir gangguan yang terjadi dalam pencapaian tujuan kebijakan. Fokus dari kelompok sasaran sendiri adalah manfaat yang diberikan pemerintah melalui kebijakan yang telah dijalankan. Salah satu alat untuk mencapai tujuan kegiatan adalah program. Program merupakan terjemahan dari kebijakan sehingga nantinya sasaran kebijakan dapat tepat pada sasaran. Dalam implementasi program, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi prosesnya:

1) Sumber Daya Manusia

Dalam konteks pembangunan manusia, kearifan dan daya kreasi, manusia merupakan faktor penentu proses pembangunan. Guna mencapai momentum pembangunan, sumber daya manusia menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan (Tjokrowinoto, 1996:46). Tjokrowinoto (1996:49-50), menyatakan pula bahwa pembangunan manusia berupaya membentuk tipe



kualitas manusia yang memiliki sikap mandiri yaitu berusaha untuk mengenal kepribadian masing-masing dalam perspektif yang benar, berusaha untuk memecahkan permasalahannya sendiri, mengembangkan kemampuan diri dan kemandirian serta memiliki sikap untuk berkerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

2) Kemampuan aparatur (Implementator di Lapangan)

Kemampuan aparatur dinilai dari kemampuan aparatur untuk menjangkau kelompok sasaran, meningkatkan kapasitas kelompok sasaran dalam mengembangkan pelayanan, mampu menyesuaikan antara output program dengan kebutuhan masyarakat atau dengan kata lain mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan membuat program guna memenuhi kebutuhan tersebut dengan memobilisasikan sumber daya yang ada untuk mendukung jalannya program yang telah dirancang. Termasuk pula kemampuan untuk memadukan antara birokrasi dengan masyarakat untuk melaksanakan program dan melakukan monitoring dan evaluasi program (Tjokrowinoto, 1996:137-138.)

3) Hambatan Institusional

Adanya disparitas yang besar dalam alokasi sumberdaya dan paradigma pembangunan manusia yang masih belum berubah (Tjokrowinoto, 1996:227).

Dapat kita ketahui bahwa sumber daya manusia yaitu masyarakat sebagai obyek dari kebijakan sangat penting. Sumber daya manusia berperan penting karena dengan perubahan yang terjadi pada masalah yang berkaitan erat dengan masyarakat dapat diketahui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah berhasil tepat sasaran atau gagal. Aparatur pemerintah dalam hal ini berperah sebagai



penerjemah kebijakan yaitu menyampaikan kebijakan yang dibuat pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat dapat berperan dalam pencapaian sasaran kebijakan. Proses implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh hambatan institusional yang meliputi paradigma dalam masyarakat. Dengan adanya implementasi kebijakan, berhasil atau tidaknya kebijakan revitalisasi Pasar Legi di Kota Blita dapat diketahui.

b) Model-model Implementasi Kebijakan

Dalam studi tentang implementasi kebijakan, terdapat beberapa model yang bertujuan memberikan kemudahan dalam memahami proses implementasi kebijakan. Wahab (2001), menyatakan bahwa tujuan pokok diciptakan suatu model implementasi kebijakan adalah yakni untuk mengefektifkan, meniru, menjelaskan, meramalkan, mencoba dan menguji hipotesis. Dikenal dua model dalam implementasi kebijakan menurut Wahab (2001:78-92) yaitu:

1) Implementasi kebijakan model Van Metter dan Van Horn.

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn disebut dengan *A Model of policy implementation*. Proses implementasi ini merupakan abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Ada enam variabel yang menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi implementasi adalah:

- (a) Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

(b) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan dari sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan

(c) Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

(d) Sikap/ kecenderungan (*disposition*) para pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat



yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

(e) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

(f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2) Implementasi kebijakan publik model George C. Edward III

George C. Edward mengemukakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

a) Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka melaksanakan keputusan-keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

b) Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan asul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

c) Disposisi (kecenderungan-kecenderungan)

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

d) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadang kala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Pada dasarnya, model-model implementasi kebijakan menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dengan model George C. Edward III tidak memiliki banyak perbedaan. Kedua model tersebut pada intinya memiliki pandangan bahwa terdapat tiga faktor penting dalam implementasi kebijakan. Faktor-faktor dalam implementasi kebijakan tersebut adalah 1) sumber daya manusia, 2) aparatur di lapangan, dan 3) komunikasi. Nampaknya model implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn lebih tepat digunakan dalam implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Legi ini, karena dengan melihat seberapa tepat tujuan kebijakan, kualitas sumber daya manusia yang ada, organisasi-organisasi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan baik formal maupun informal, sikap dari pelaksana kebijakan, komunikasi dari organisasi yang terkait dan lingkungan dimana kebijakan tersebut direalisasikan maka dapat diketahui seberapa besar keberhasilan dari kebijakan tersebut.

c) Faktor-faktor Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Kebijakan

Tujuan utama dalam setiap pembuatan kebijakan tentunya adalah implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan tentunya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian implementasi sebuah kebijakan tersebut. Terdapat banyak model guna menganalisis faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Salah satunya adalah model yang dikemukakan oleh George Edward III yang melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Edward dalam Widodo (2001:96-110) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition, and bureucratic structure*. Model Implementasi George C. Edward III tersebut yaitu :

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2001:97). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat

mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2001:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

(a) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

(b) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

(c) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

(d) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)



Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

(e) Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

(f) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam



implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dalam perumusan suatu kebijakan tentunya diharapkan pencapaian sasaran yang tepat. Untuk mencapai sasaran tersebut melalui proses implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang akan mempengaruhi berhasil atau gagalnya implementasi kebijakan. Dengan mengacu pada pandangan George Edward III maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya faktor sumber daya yang memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Seperti pada pelaksanaan kebijakan revitalisasi Pasar Legi, jalannya kebijakan tersebut tergantung dari bagaimana staff, aparatur, dan masyarakat dalam menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan ataukah tidak sesuai.

4. Evaluasi Kebijakan

a) Pengertian dan Fungsi

Pada dasarnya setiap kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah bukanlah kebijakan yang sempurna, karena kebijakan yang diambil belum tentu dapat menguntungkan semua pihak. Dalam setiap pelaksanaan kebijakan maupun mulai dari perumusan kebijakan tentunya telah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Kebijakan yang telah ditentukan selalu diharapkan dapat mencapai

sasaran atau tujuan yang memang telah ditargetkan. Untuk mencapai sasaran yang tepat tentunya implementasi kebijakan tersebut menimbulkan dampak, dan dampak tersebut dapat menjadi dampak yang baik maupun dampak yang merugikan banyak pihak. Dengan melihat dampak yang terjadi akan dapat diketahui apakah kebijakan yang ditetapkan efisien atau tidak. Untuk mengetahui efisien atau tidak kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah diperlukan tahapan akhir dari kebijakan publik yaitu evaluasi kebijakan.

Menurut Abidin (2006: 211) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu evaluasi awal sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (*ex-ante evaluation*), evaluasi dalam proses pelaksanaan atau *monitoring*, evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*). Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kebijakan publik seringkali terjadi kegagalan dalam meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wibawa (1994: 9-10) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 aspek yaitu proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampak kebijakan.

Evaluasi terhadap aspek implementasi disebut evaluasi implementasi sedangkan evaluasi terhadap aspek konsekuensi dan efektifitas dampak disebut evaluasi dampak kebijakan. Abidin (2006: 213) lebih lanjut mengemukakan bahwa informasi yang dihasilkan dari evaluasi merupakan nilai (*values*) yang antara lain berkenaan dengan efisiensi (*efficiency*), yakni perbandingan antara

hasil dengan biaya, atau (hasil/biaya); keuntungan (*profitability*), yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil/biaya); efektif (*effectiveness*), yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya; keadilan (*equity*), yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan); *detriments*, yakni indikator negatif dalam bidang sosial seperti kriminal dan sebagainya; manfaat tambahan (*marginal rate of return*), yaitu tambahan hasil banding biaya atau pengorbanan (*change-in benefits/change -in-cost*).

Makna evaluasi kebijakan dibagai menjadi tiga yaitu evaluasi proses kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi lingkungan kebijakan. Dalam konteks penelitian ini yaitu kebijakan revitalisasi pasar tradisional, maka evaluasi implementasi kebijakan diperlukan untuk menilai dan mengetahui sampai sejauh mana efektifitas sebuah kebijakan publik bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, jika analisis kebijakan merupakan kegiatan pokok sekaligus menjadi pijakan awal untuk menjelaskan kenapa sebuah kebijakan diperlukan, maka evaluasi diperlukan untuk mengetahui hasil atau kinerja atau keluaran dari sebuah kebijakan. Sasaran akhir dari langkah evaluasi implementasi kebijakan adalah diperolehnya informasi mengenai nilai hasil atau manfaat hasil yaitu efektifitas dari kebijakan yang akan berkaitan dengan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya dan politik yang mempengaruhinya. Informasi yang dihasilkan dalam kegiatan evaluasi akan sangat bermanfaat sekaligus dibutuhkan sebagai bahan pembuatan rekomendasi untuk perbaikan sebuah kebijakan, sehingga evaluasi kebijakan tentunya memiliki beberapa fungsi.

Fungsi evaluasi kebijakan sangat berguna untuk mendapatkan hasil/informasi mengenai kinerja kebijakan. Ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik yaitu evaluasi semu, formal dan keputusan teoritis. Penjelasan lebih rinci dikemukakan oleh Dunn dalam Dwidjowijoto, (2006: 163-164) sebagai berikut:

1. Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang *valid* mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan. Asumsi utamanya adalah bahwa ukuran tentang manfaat dan nilai merupakan suatu yang dapat terbukti dengan sendirinya.
2. Evaluasi formal (*formal evaluation*) juga menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang *valid* dan terpercaya mengenai hasil suatu kebijakan. Asumsi utamanya adalah tujuan, dan target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai kebijakan program.
3. Evaluasi keputusan teoritis (*decision theoretic evaluation*) menggunakan metode deskriptif juga untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan *valid* menanggapi hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai dari pelaku kebijakan.

Sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan, evaluasi memiliki fungsi dan tujuan. Menurut Wibawa (1994: 35), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. *Audit*. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. *Akunting*. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut

Melalui fungsi evaluasi kebijakan, maka dapat diketahui seberapa efektif suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dalam konteks penelitian ini adalah kebijakan revitalisasi pasar tradisional terhadap aksesibilitas pedagang dan pembeli. Dengan fungsi evaluasi kebijakan akan diketahui pula implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pelaku kebijakan telah sesuai dengan standar dan prosedur ataukah justru menyimpang dari sasaran kebijakan.

b) Tipe dan Kriteria

Evaluasi memiliki sejumlah fungsi utama dalam kebijakan publik. Evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat mengetahui sejauh mana kebutuhan, nilai dan kesempatan



dengan melihat implementasi kebijakan, dimana tujuan-tujuan kebijakan dapat tercapai. Evaluasi mempunyai karakteristik yang terdiri dari empat karakter. Kriteria-kriteria yang ditetapkan menjadi tolak ukur dalam menentukan berhasil atau tidak suatu kebijakan publik. Dunn dalam Efriandi (2010: 20) mengemukakan bahwa beberapa kriteria rekomendasi kebijakan terdiri atas:

- 1) Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
- 2) Efisiensi (*efficiency*). Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari biaya moneter.
- 3) Kecukupan (*adequacy*). Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
- 4) Perataan (*equity*). Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau

pelayanan pendidikan kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan.

Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan masyarakat.

- 5) Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
- 6) Ketetapan (*appropriateness*). Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketetapan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan Kriteria individu tetapi dua atau lebih Kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Mengevaluasi implementasi suatu program atau kebijakan dalam konteks ini adalah kebijakan revitalisasi pasar tradisional diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan suatu program kebijakan. Dengan mengikuti atau melihat kriteria-kriteria kebijakan oleh Dunn dalam Efriandi (2010:20) tersebut, peneliti akan dapat menyimpulkan apakah kebijakan revitalisasi Pasar Legi telah efektif atautkah masih belum sesuai dengan sasaran.

B. Ekonomi Politik

1. Pengertian

Istilah ekonomi politik sering kali dikaitkan dengan permasalahan negara dan masyarakat. Ekonomi politik memang bersifat politik yang membahas kewenangan negara dalam mengatur masyarakat khususnya yang berhubungan dengan ekonomi misalnya membahas masalah alokasi potensi daerah seperti pasar. Istilah ekonomi politik diambil dari bahasa Yunani, *polis* yang artinya sebuah kota atau sebuah unit ekonomi, dan *oikonomike* yang maknanya mengacu pada manajemen suatu rumah tangga. Staniland dalam Deliarnov (2006:8) menjelaskan bahwa ilmu ekonomi politik “mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial: hubungan antara politik dan ekonomi. Isu ini memiliki dua sisi baik eksplanatori maupun normatif. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling terkait dan mengenai bagaimana seharusnya mereka terkait”.

Ekonomi politik merupakan cabang ilmu sosial yang kemudian berkembang menjadi ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan negara dan peningkatan sumber daya negara. Hal ini semakin menjelaskan bahwa kepentingan ekonomi dalam suatu negara akan berkaitan dengan kepentingan politik dalam negara tersebut. Dalam konteks kebijakan revitalisasi pasar tradisional ini, kepentingan ekonomi muncul pada salah satu sasaran kebijakan yaitu meningkatkan pendapatan daerah. Kepentingan politik muncul dengan adanya pinjaman kepada daerah sebagai sumber dana pembangunan pasar.

Ilmu ekonomi politik mempelajari sistem ekonomi dan politik yang diterapkan oleh negara atau pemerintah, yang dipelajari adalah bagaimana sistem

kekuasaan dan pemerintahan dipakai sebagai instrumen atau alat untuk mengatur kehidupan sosial atau ekonomi. Sistem kekuasaan menjadi fokus paling utama dalam ilmu ekonomi politik tersebut. Jika peran negara atau pemerintah sangat dominan dalam sistem ekonomi, maka sistem ekonomi suatu negara lebih digolongkan ke dalam anatomi negara sosialis atau komunis. Jika peran negara kecil atau tidak dominan, maka sistem ekonomi politik negara bersangkutan dapat digolongkan pada kelompok negara kapitalis-liberal. Dengan analisis secara anatomis tersebut, maka sistem ekonomi politik secara faktual dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu sistem sosialis dan kapitalis liberal (Rachbini, 202:14).

Dalam perkembangannya, istilah ekonomi politik berguna untuk mendampingi istilah baku ilmu ekonomi, fokusnya tidak lagi pada fenomena-fenomena ekonomi secara umum, melainkan secara lebih spesifik yaitu dengan menyoroyi interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik.

2. Pilihan Publik

Teori Pilihan Publik menggunakan prinsip yang sama seperti yang digunakan para ekonom untuk menganalisa kegiatan masyarakat di pasar dan menerapkannya pada kegiatan masyarakat dalam pembuatan keputusan publik. Ekonom-ekonom yang mengkaji perilaku dalam pasar swasta mengasumsikan bahwa orang digerakkan terutama oleh kepentingan pribadi. Walaupun banyak orang mendasarkan sejumlah tindakan mereka karena kepedulian mereka terhadap orang lain, motif dominan dalam tindakan orang di pasar merupakan pengusaha, pekerja, maupun konsumen, adalah suatu kepedulian terhadap diri mereka sendiri. Ahli Ekonomi Pilihan Publik membuat asumsi yang sama bahwa walaupun orang

bertindak dalam pasar politik memiliki sejumlah kepedulian terhadap orang lain, motif utama mereka adalah kepentingan pribadi.

Teori pilihan publik berusaha mengkaji tindakan rasional dari aktor-aktor politik, baik di parlemen, lembaga pemerintah, lembaga kepresidenan, masyarakat pemilih, pencinta lingkungan hidup dan sebagainya. Buchanan mengulas teori pilihan publik dari dua aspek (Rachbini, 2002:70-84) :

a. Pendekatan *catallaxy*

Ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat. Pembeli kebijakan publik ini adalah masyarakat pemilih yang akan memilih kebijakan yang benar-benar dapat mewakili kebutuhan mereka.

b. *Homo economicus* (konsep manusia ekonomi)

Konsep ini menjelaskan bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan pada kelangkaan sumber daya. Dalam pasar politik, politisi sebagai pelaku memaksimalkan kepuasan pribadi yang dimotivasi oleh banyak faktor seperti gaji, reputasi publik, kekuasaan dan ruang untuk mengontrol birokrasi. Sementara para pemilih akan mengontrol suara untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan.

Berdasarkan kedua aspek utama dalam kajian ilmu tersebut, maka sebagai pemasok (*supplier*) adalah para politisi, parpol, birokrasi dan pemerintah. Sedang sebagai peminta (*demand*) adalah pemilih (*voters*). Jenis transaksi komoditas publik, alat transaksi suara dan jenis pertukaran adalah politik sebagai pertukaran. Kebijakan publik yang akan diambil tentunya berdasarkan asas pertukaran yang

didasari pemikiran rasional. Interaksi antara penawaran dan permintaan terjadi, di mana politisi dipandang sebagai produsen yang menawarkan cara terbaik untuk mengonsumsi komoditas publik dan masyarakat pemilih sebagai konsumen, yang akan memanfaatkan dan mengonsumsi komoditas publik tersebut. Sekiranya kekuatan permintaan dan penawaran seimbang, maka kebijakan publik yang diambil akan menguntungkan kesemua pihak.

3. Mekanisme Pasar

Ekonomi politik sangat erat kaitannya dengan sistem ekonomi suatu negara. Dimana ekonomi politik sering dikaitkan dengan pengalokasian sumber daya ataupun potensi daerah seperti pasar. Ekonomi politik dan pasar memiliki keterkaitan dalam meningkatkan pendapatan suatu negara atau pemerintahan. Pasar sering diartikan sebagai tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Pengertian tersebut sering pula dipakai sebagai pengertian pasar tradisional. Pengertian pasar dari sudut pandang pemasaran adalah bahwa pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan sanggup untuk melibatkan diri dalam proses pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut (Tjiptono, 2004:59).

Pada umumnya mekanisme pasar sudah berjalan dengan cukup efisien dalam mengembangkan perekonomian. Namun sering terjadi keadaan yang tidak menguntungkan dalam berbagai hal baik itu terhadap pedagang maupun pembeli di dalam pasar. Untuk itu, dalam mekanisme pasar sampai pada saat ini masih diperlukan campur tangan pemerintah sebagai jembatan antara pedagang dan pembeli sehingga keadaan yang tidak menguntungkan dapat dihindari. Seperti

pada konteks revitalisasi pasar tradisional ini, pemerintah berperan sebagai jembatan dalam melancarkan aksesibilitas antara pedagang dan pembeli.

C. Revitalisasi

1. Pengertian

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Menurut Danisworo dalam Caray (2009) bahwa pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat). Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan pernyataan Leretna dalam Caray (2009) bahwa keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tapi masyarakat dalam arti luas.

2. Teori Revitalisasi dan Rancang Kota

Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal sebagai berikut:



- a) Intervensi fisik, kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (*urban realm*). Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan, khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Isu lingkungan (*environmental sustainability*) pun menjadi penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.
- b) Rehabilitasi ekonomi Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan kota. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (*vitalitas baru*). Revitalisasi yang mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi ini lah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk meningkatkan kegiatan perdagangan pada Pasar Legi Kota Blitar.
- c) Revitalisasi sosial/institusional. Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (*interesting*), jadi bukan sekedar membuat tempat yang lebih indah. Maksudnya, kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (*public realms*). Sudah menjadi sebuah tuntutan yang logis, bahwa kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan



lingkungan sosial yang berjati diri (*place making*) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik.

D. Aksesibilitas Sektor Perdagangan

Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu tujuan lokasi, yang menjadi ukuran adalah jarak, waktu tempuh, kelengkapan dan kualitas dari fasilitas yang tersedia. Seperti jalan yang bagus, adanya swalayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan segala fasilitas pendukungnya. Tak jarang aksesibilitas menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan tempat tinggal, tempat bekerja ataupun untuk alasan pendidikan. Tidak jauh berbeda dari pengertian aksesibilitas tersebut, aksesibilitas juga dapat diartikan sebagai konsep yang menggabungkan system pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan system jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tataguna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui system jaringan transportasi. Sehingga dengan melihat tujuan dari kebijakan revitalisasi pasar Legi ini, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas sektor perdagangan merupakan tingkat kemudahan mencapai suatu tujuan yang menjadi ukuran adalah kelengkapan dan kualitas dari fasilitas yang disediakan dalam memenuhi kebutuhan perdagangan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam mengevaluasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional pada Pasar Legi Kota Blitar adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu

penelitian yang berupaya memberikan gambaran mengenai fenomena tertentu secara terinci sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas. Hadi (1993:3) lebih jelas mengartikan penelitian deskriptif sebagai, “Suatu penelitian yang bertujuan melukiskan keadaan obyek/peristiwa tertentu tanpa maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum”.

Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan tentang suatu kejadian. Gorman dan Clayton dalam Santana (2007:28) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang melaporkan *meaning of events* dari apa yang diamati oleh peneliti. Hasil peneliti berisi tentang pengamatan berbagai kejadian dan interaksi yang diamati langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian yaitu Pasar Legi Kota Blitar. Sehingga penelitian dalam metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian dengan melakukan pembacaan ilmiah, menguraikan, dan menginterpretasi untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan sistematis.

B. Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa faktor terpenting. Salah satu faktor penting dalam penelitian tersebut adalah menentukan fokus dari penelitian. Perlunya fokus penelitian adalah untuk membatasi masalah dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak melebar atau terlalu luas. Fokus penelitian ini juga ditujukan agar penelitian ini dapat lebih terarah, terinci serta tidak

menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti kemudian mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Legi pada sektor perdagangan di Kota Blitar, antara lain:
 - a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
 - b. Sumber Daya.
 - c. Lingkungan Ekonomi dan lingkungan sosial Pasar Legi.
 - d. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan revitalisasi pasar dan penataan pedagang.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pemerintah kota Blitar dalam implementasi kebijakan revitalisasi pasar pada Pasar Legi Kota Blitar.
 - a. Faktor Internal
 - b. Faktor Eksternal
3. Hasil Evaluasi Implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Legi terhadap aksesibilitas pedagang dan pembeli, antara lain:
 - a. Dampak kebijakan meliputi :
 - 1) Dampak Pedagang
 - 2) Dampak Masyarakat
 - 3) Dampak Organisasional
 - 4) Dampak Fisik

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Pemerintah Kota Blitar. Pengambilan lokasi ini dilakukan dengan



pertimbangan bahwa Kota Blitar merupakan kota yang tidak tergolong kecil dan belum termasuk kota besar dengan perkembangan sektor perdagangan yang baik. Disamping itu juga, setelah dilakukannya revitalisasi pasar ternyata masih menimbulkan permasalahan yaitu dampak revitalisasi pasar terhadap aksesibilitas pedagang dan pembeli.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dapat diambil. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan situs penelitian pada:

1. Pasar Legi yang terletak di Jalan Mawar Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.
2. Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar, Kantor Badan Pusat Statistik Kota Blitar.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penentuan metode pengumpulan data, sumber data penelitian merupakan faktor penting yang harus menjadi pertimbangan. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana saja data dapat diperoleh.

Terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut sangat penting atau diperlukan untuk ketepatan sejumlah informasi yang relevan dengan data tentang variabel-variabel penelitian dan untuk menyederhanakan data yang akan dikumpulkan, agar dalam penelitian dapat membuat kesimpulan-kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Penjelasan mengenai sumber data adalah sebagai berikut:

1. Data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer dapat diperoleh peneliti dengan teknik wawancara. Melalui wawancara dengan Kepala Kantor dan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar serta pedagang dan pembeli dalam Pasar Legi, peneliti akan memperoleh informasi yang lengkap yang mungkin belum dapat diperoleh dari data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer dapat diperoleh dari Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar, serta pedagang dan pembeli di dalam pasar maupun disekitar Pasar Legi Kota Blitar.
2. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dapat diperoleh dari majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen yang mempunyai keterkaitan informasi/data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, data dapat diperoleh dari Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar dan Kantor Badan Pusat Statistik Kota Blitar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data, ada satu hal penting yang harus dipikirkan oleh peneliti yaitu teknik-teknik tertentu agar data yang diperoleh nantinya akan relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dari dekat terhadap obyek yang diteliti. Teknik observasi ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang obyek di lapangan. Peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai fasilitas penunjang untuk pedagang dan pembeli di Pasar Legi serta minat pembeli di lantai 1 dan 2 Pasar Legi Kota Blitar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terkait diantaranya dengan Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar serta Kepala Bagian Tata Usaha, dan dengan 6 pedagang dan 5 pembeli di dalam dan sekitar Pasar Legi Kota Blitar.

3. Dokumentasi

Guna melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, maka perlu digunakan teknik dokumentasi. Dengan teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti perundang-undangan, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa Peraturan Daerah Kota Blitar, catatan tertulis berupa katalog Kota Blitar dalam Angka serta foto-foto Pasar Legi setelah mengalami revitalisasi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk menggali data dalam penelitian sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah peneliti sendiri, yaitu dalam memperoleh data peneliti sebagai instrumen menyaksikan, mengamati, serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berlangsung dan berkaitan dengan obyektif. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiono, 2011:222). Setelah fokus penelitian sudah jelas ditentukan, terdapat instrumen penunjang berikutnya yaitu pedoman wawancara. Stainback dalam Sugiono (2011:232) menyatakan bahwa dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Untuk itu peneliti menggunakan pedoman wawancara dalam melakukan wawancara dengan Kepala Kantor dan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar serta pedagang dan pembeli.

G. Analisis Data

Dalam penelitian, setelah data terkumpul semua, maka selanjutnya adalah melakukan analisis yang bertujuan untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Sesuai dengan penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul adalah dengan menggunakan teknik analisis model interaktif (*interactive model of analisis*), Miles dan Huberman dalam Sugiono (2011:246) mengatakan bahwa dalam model analisis ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu:

- 1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berjalan terus menerus selama penelitian. Dalam reduksi data peneliti menggolongkan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti juga mengarahkan data-data yang diperoleh ke dalam bagian-bagian dalam penyajian data.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

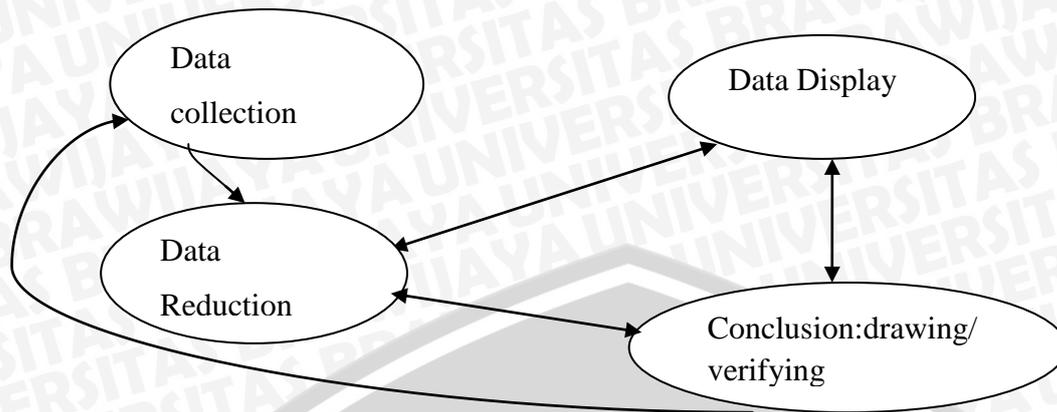
Penyajian data merupakan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan tentang adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini berupa tabel kondisi demografi Kota Blitar, gambar berupa peta Kota Blitar, gambaran umum pedagang dan pembeli pada Pasar Legi Kota Blitar, dampak terhadap aksesibilitas pedagang dan pembeli serta faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan.

3) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Peneliti berusaha untuk menggambarkan (mendeskripsikan) dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan. Setelah dilakukan penyajian data fokus penelitian serta analisis data maka peneliti menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data berupa efektifitas dampak kebijakan revitalisasi pasar tradisional pada Pasar Legi Kota Blitar terhadap dampak aksesibilitas pedagang dan pembeli yang juga merupakan jawaban dari rumusan masalah.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut:





Gambar 1. Skema Model Analisis Interaktif

(Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiono, 2011:247)

Dengan bagan tersebut, model analisis yang dapat digunakan yaitu dengan melalui pengumpulan berbagai macam data (*data collection*) yang kemudian diteruskan dengan melakukan pemilahan dan pemilihan data yang tepat. Jika data telah terpilih (*data reduction*) maka penyajian data (*data display*) dapat dilakukan baik melalui tabel, gambar, ataupun skema. Dan setelah penyajian data yang diikuti dengan analisis, hal terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan menarik kesimpulan (*conclusion*) dari tahap-tahap sebelumnya.

H. Uji Keabsahaan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2011: 268-277), pengujian keabsahan data meliputi :

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan pengamatan yaitu peneliti secara langsung berinteraksi dengan pedagang dan pembeli di dalam Pasar Legi, peneliti juga menggunakan bahan referensi sebagai pendukung wawancara yaitu dengan alat bantu camera agar data-data yang diberikan lebih terpercaya karena dilengkapi dengan foto-foto keadaan Pasar Legi.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Menurut Faisal (dalam Sugiyono, 2011: 277), “Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas”. Laporan yang ditulis oleh peneliti diraikan secara terperinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya sehingga hasil evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional ini tidak hanya dapat diaplikasikan pada Pasar Legi tetapi juga dapat diaplikasikan pada tempat-tempat lain.

3. Uji Reliabilitas (*Reliability*)

Melalui uji reliabilitas atau *dependability* peneliti dapat mengulangi proses penelitian di Pasar Legi dan Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar. Sehingga keseluruhan proses penelitian dapat diaudit oleh dosen pembimbing dengan peneliti dapat menunjukkan semua tulisannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Faisal (dalam Sugiyono, 2011: 277) bahwa, “Jika peneliti

tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas di lapangannya, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan”.

4. Uji Obyektivitas (*Confirmability*)

Penelitian dikatakan obyektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Penelitian ini mngvaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional pada Pasar Legi Kota Blitar, proses yang dilakukan adalah melalui wawancara dengan pihak yang terkait dan hasil penelitian dapat diujikan kesesuaiannya dengan proses penelitian tersebut.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Perkembangan Kota Blitar

a. Sejarah Pembangunan Kota Blitar

Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria, Kota Lahar dan Kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi kota Blitar. Walaupun status pemerintahannya adalah Pemerintah Kota, tidak serta-merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakatnya seperti yang terjadi di kota-kota besar. Memang ukurannya pun tidak mencerminkan sebuah kota yang cukup luas. Level yang dicapai kota Blitar adalah sebuah kota yang masih tergolong antara klasifikasi kota kecil dan kota besar. Secara faktual sudah bukan kota kecil lagi, tetapi juga belum menjadi kota besar.

Sejarah perkembangan Kota Blitar terbentuk sesuai dengan legenda dalam sejumlah buku sejarah, terutama buku Bale Lantar, Blitar didirikan pada sekitar abad ke-15. Pada tahun 1906, pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan sebuah *Staatsblad van Nederlandche Indie* Tahun 1906 Nomor 150 tanggal 1 April 1906, yang isinya adalah menetapkan pembentukan *Gemeente* Blitar. Momentum pembentukan *Gemeente* Blitar

inilah yang kemudian dikukuhkan sebagai hari lahirnya Kota Blitar.

Kepastian kebenarannya diperkuat oleh beberapa fakta antara lain dengan adanya Undang-undang yang menetapkan bahwa ibukota (Kabupaten) Blitar dikukuhkan sebagai *Gemeente* (Kotapraja) Blitar, *Gemeente* (Kotapraja) Blitar oleh pemerintah pusat kolonial Belanda setiap tahun diberikan subsidi sebesar 11,850 gulden. *Gemeente* (Kotapraja) Blitar dibebani kewajiban-kewajiban dan diberikan subsidi secara terinci bagi *Gemeente* (Kotapraja) Blitar, diadakan suatu dewan yang dinamakan Dewan Kotapraja Blitar dengan jumlah anggota 13 orang dan undang-undang pembentukan Kotapraja Blitar itu mulai berlaku tanggal 1 April 1906. Namun, sejumlah produk hukum pemerintah kolonial Belanda itu, tidak menyurutkan rakyat Kota Blitar untuk membebaskan diri dari penjajahan. Sejumlah perlawanan-perlawanan untuk memerdekakan diri, terus berlangsung.

Hingga akhirnya, Jepang pun berhasil menduduki Kota Blitar, pada tahun 1942. Pada tahun itu pulalah, istilah *Gementee* Blitar berubah menjadi *Blitar Shi*, dengan luas wilayah 16,1 km², dan berjumlah penduduk sekitar 45.000 jiwa. Perubahan status itu, diperkuat dengan produk hukum yang bernama *Osamu Seerai*. Di masa ini penjajah Jepang menggunakan isu sebagai saudara tua bangsa Indonesia, Kota Blitar pun masih belum berhenti dari pergolakan. Bukti yang paling hebat adalah pemberontakan PETA Blitar yang dipimpin Soedancho Suprijadi.

Pada masa kemerdekaan pada tahun 1950, berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, Kota Blitar berubah statusnya menjadi Blitar dan dibentuk sebagai Daerah Kota Kecil. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, status Kota Blitar berubah menjadi Kotapraja Blitar, dengan luas wilayah tetap dan jumlah penduduknya menjadi 60.000 jiwa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Kotapraja Blitar pun ditetapkan menjadi Kotamadya Blitar dengan luas wilayah tetap dan didiami oleh 73.143 jiwa.

Pada masa pemerintahan Orde Baru walaupun pembangunan Kota Blitar telah berjalan dengan baik tetapi belum menunjukkan hasil yang mengembirakan karena sistem pemerintahan masih menggunakan sistem sentralisasi dengan pendekatan *top-down* yang menyebabkan terpasungnya daya kreativitas dan inovasi rakyat. Di masa pemerintahan Orde Baru, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 luas wilayah Kotamadya Blitar dimekarkan dari yang semula hanya 1 Kecamatan dengan luas 16,1 km², menjadi 3 (tiga) kecamatan dan 20 kelurahan dengan luas keseluruhan menjadi 32,369 km². Jumlah penduduk Kota Blitar ketika itu telah mencapai 106.500 jiwa. Pada tahun 1999, ditetapkan sebuah Undang-Undang yang sangat fenomenal, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Melalui Undang-Undang tersebut, sebutan Kotamadya Blitar disesuaikan menjadi Kota Blitar.

b. Kondisi Geografi

Kota Blitar adalah kota terkecil di Jawa Timur dengan luas wilayah yang tidak lebih dari 32,58 km² yang dibagi dalam tiga wilayah kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas wilayah 12,15 km² kemudian Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km² dan Kecamatan Sukorejo 9,93 km², dengan jumlah penduduk Kota Blitar 133.306 jiwa menurut registrasi tahun 2008, registrasi tersebut merupakan suatu kegiatan pencatatan rutin setiap kejadian yang terjadi pada penduduk seperti kelahiran, kematian, serta migrasi masuk maupun keluar . Adapun luas wilayahnya dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Tahun 2008

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km²)
1. Sukorejo	1. Tlumpu	1.0153
	2. Karangsari	0.8824
	3. Turi	0.5086
	4. Blitar	1.3321
	5. Sukorejo	1.4662
	6. Pakunden	2.2620
	7. Tanjungsari	2.4581
	2. Kepanjenkidul	
	1. Kepanjenkidul	0.8670
	2. Kepanjenlor	0.6133
	3. Kauman	0.6803
	4. Bendo	1.5185
	5. Tanggung	2.2300
	6. Sentul	2.6830
	5. Ngadirejo	1.9102

3. Sananwetan		12.1516
	1. Rembang	0.8443
	2. Klampok	1.5307
	3. Plosokerep	1.2481
	4. Karangtengah	1.7954
	5. Sananwetan	2.1279
	6. Bendogerit	1.9552
	7. Gedog	2.6500
	Kota Blitar	32.5785

Sumber : Kota Blitar Dalam Angka 2009

Wilayah Kota Blitar berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nglegok, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Garum, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sanankulon yang semua kecamatan tersebut berada di Kabupaten Blitar.

Adapun gambaran Kota Blitar dapat disajikan dalam Gambar 1. Peta Kota Blitar di bawah ini :





Sumber : <http://www.ummushofi.files.wordpress.com>

Kota Blitar terletak 156 m di atas permukaan laut. Dilihat dari ketinggian tersebut Kota Blitar termasuk dalam kategori daerah datar.

Sedangkan pembagian daerah ketinggian adalah sebagai berikut :

1. Ketinggian 175-200 meter dpl, seluas 605.203 Ha (18.577 % dari luas wilayah)

2. Ketinggian 150-175 meter dpl, seluas 1.055.200 Ha (32.359 % dari luas wilayah)
3. Ketinggian 150 meter dpl luasnya sekitar 692.234 Ha (21.248 % dari luas wilayah)

Sedangkan kemiringan rata-rata Kota Blitar adalah antara 0-2 %, kecuali pada daerah utara kemiringan antara 2-15. Kedalaman tanah di wilayah ini bervariasi mulai dari 30-90 cm yang meliputi 71.5 % dari luas wilayah. Urutan selanjutnya dengan kedalaman 60-90 cm meliputi 15.5 % dan terkecil dengan kedalaman 30-60 cm meliputi areal 13%. Jarak Kota Blitar dengan Kota Surabaya sekitar 167 km atau kurang lebih 4-5 jam perjalanan darat. Wilayahnya berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar dan secara astronomis terletak pada koordinat $112^{\circ}14'$ - $112^{\circ}28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ}2'$ - $8^{\circ}8'$ Lintang Selatan. Berada pada ketinggian rata-rata dari permukaan air laut sekitar 140-245 m dengan tingkat kemiringan 0° sampai 15° wilayah Kota Blitar masih tergolong dalam 8 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan ketinggian dari air laut diatas 100 m.

Tekstur tanah terbesar berupa tekstur halus (85.3 %) yang berarti bahwa tanah yang ada di wilayah ini mempunyai kemampuan menahan atau mengikat air cukup besar. Sisanya adalah tekstur sedang yang meliputi 24.7% dari luas wilayah. Tekstur yang demikian kurang dapat menahan air, namun dilihat dari segi menyediakan unsur hara yang diperlukan tanaman, relatif lebih baik daripada tanah yang bertekstur halus. Kota Blitar mempunyai tipe iklim agak basah dengan suhu rata-rata 29°C dengan curah

hujan rata-rata pertahun sekitar 102 hari dan besarnya curah hujan rata-rata sebesar 122.857 mm/tahun. Sungai yang mengalir mengelilingi Kota Blitar membentuk pola aliran radial yaitu Sungai Lahar sepanjang 7,84 km menuju ke selatan menyatu dengan Sungai Brantas.

c. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil registrasi tahun 2008, jumlah penduduk di Kota Blitar adalah 133.306 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Blitar terdapat di Kecamatan Sananwetan yaitu sejumlah 51.391 jiwa, sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Kepanjen Kidul yaitu sebanyak 37.310 jiwa. Pada tabel 2 dibawah ini dapat dilihat jumlah penduduk pada setiap kecamatan :

Tabel 2

Jumlah Penduduk Pada Setiap Kecamatan

Tahun 2008

No.	Kecamatan	Jumlah Jiwa
1.	Sananwetan	51.391
2.	Kepanjenkidul	37.310
3.	Sukorejo	44.605
Total		133.306

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka tahun 2009

Penduduk Kota Blitar dengan jumlah 133.306 terdiri dari 66.029 laki-laki dan penduduk perempuan berjumlah 67.277 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,14. Jumlah penduduk tersebut meningkat sebesar

1.199 jiwa atau 0,91% dari tahun 2007. Adapun jumlah penduduk per Kecamatan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan

Tahun 2007

No.	Kecamatan	Penduduk		Rasio
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sananwetan	25.575	25.816	99,07
2.	Kepanjenkidul	18.963	18.963	96,75
3.	Sukorejo	22.107	22.498	98,26

Sumber : Kota Blitar Dalam Angka 2009

Dari tabel jumlah penduduk pada setiap kecamatan serta jumlah penduduk menurut jumlah penduduk tersebut, maka pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan jumlah Kepala Keluarga dapat diketahui :

1. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun : 0,76%
2. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata (jiwa/km²) : 4.093
3. Jumlah KK : 42.847

Adapun tabel sebaran dan kepadatan penduduk Kota Blitar sebagai berikut:

Tabel 4

Sebaran dan Kepadatan Penduduk di Kota Blitar

Tahun 2007

No.	Kecamatan	Penduduk	
		Jumlah (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1.	Sananwetan	51.391	4.130
2.	Kepanjenkidul	37.310	3.553
3.	Sukorejo	44.605	4.442
Total		133.306	12.125

Sumber : Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2009

Dari tabel sebaran dan kepadatan penduduk pada Kota Blitar di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu Kecamatan Sukorejo (4.442 jiwa/km²), sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah yaitu Kecamatan Kepanjen Kidul (3.553 jiwa/km²).

Penduduk pada setiap daerah tentu memiliki mata pencaharaan yang beraneka ragam, hal ini juga terjadi pada penduduk di wilayah Kota Blitar. Selain melihat sebaran dan kepadatan penduduknya, mata pencaharian penduduk Kota Blitar berbeda-beda seperti PNS sebanyak 3.972 orang meningkat 142 orang dari tahun 2007, pegawai swasta 7.659 orang dengan tenaga kerja terbanyak berada pada sektor perindustrian yang mencapai 3.815 orang. Mata pencaharian lain dari penduduk Kota Blitar meliputi perdagangan baik perdagangan besar maupun kecil, pertanian dengan lahan pertanian terluas terletak di Kecamatan Sananwetan, dan peternakan. Sektor unggulan dari penduduk Kota Blitar yaitu perdagangan serta pertanian.

2. Kondisi dan Gambaran Umum Pasar Legi Kota Blitar

Pasar Legi Kota Blitar terletak di lokasi Jalan Mawar wilayah Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Pasar Legi merupakan salah satu pasar induk yang ada di Kota Blitar seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2001. Bangunan pasar yang ada saat ini terbilang sebagai bangunan pasar terbesar di Kota Blitar dibandingkan dengan pasar lainnya seperti Pasar Templek, Pasar Pahing, Pasar Dimoro, Pasar Pon, maupun Pasar Loak.

Pasar Legi pada mulanya dibangun pada tahun 1911 dan telah mengalami beberapa kali pembenahan yaitu pada tahun 1977 dan 1999. Revitalisasi yang dilakukan pada kedua tahun tersebut bukan merupakan pembenahan secara total. Hingga pada tahun 2003 pemerintah merasa kondisi bangunan Pasar Legi sudah tidak memadai lagi. Pada tahun itulah sesuai Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kota Blitar Tahun 2001-2010 mengenai pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pasar Legi sebagai pasar induk dan pusat distribusi barang dan tahapan pembangunan Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar mengadakan pembangunan dan perubahan beberapa fasilitas umum yang ada di Kota Blitar yaitu Perpustakaan Bung Karno, Stadion Patria yang kini menjadi Stadion Supriadi serta Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan, Pasar Legi bersama ketiga fasilitas umum tersebut direvitalisasi.

Setelah melalui revitalisasi pada tahun 2003 dan pembangunan selesai pada tahun 2004, Pasar Legi baru diresmikan pula dengan ketiga fasilitas umum masyarakat Kota Blitar. Saat ini Pasar Legi berdiri di atas lahan pemerintah seluas 17.883 m². Pasar Legi saat ini terdiri dari 2 lantai bangunan yang dibagi menjadi 791 kios dan 929 los. Dengan jumlah kios tersebut Pasar Legi ditempati oleh 1.720 pedagang baik pedagang baru maupun pedagang lama yang terdiri dari pedagang sayuran, buah-buahan, pakaian, makanan jadi, pandai besi, daging dan ikan, perhiasan emas dan perak, barang pecah belah serta salon. Melalui revitalisasi tersebut, tentunya pemerintah Kota Blitar melalui Pasar Legi berupaya memberikan kemudahan aksesibilitas pada pedagang dan pembeli baik dari dalam Kota Blitar ataupun luar Kota Blitar. Aksesibilitas yang dimaksud dalam revitalisasi tersebut meliputi pemberian kemudahan pada kelengkapan fasilitas pada pedagang dan pembeli.

Fasilitas penunjang baru yang ada pada Pasar Legi saat ini meliputi lahan parkir seluas 400 m² yang merupakan pembenahan dari fasilitas yang telah ada dari Pasar Legi yang lama. Namun, dengan revitalisasi pasar pemerintah nampaknya memberikan fasilitas penunjang baru yaitu berupa Radio Pasar, Musholla, MCK, CCTV, dan Informasi yang semua fasilitas tersebut belum ada pada Pasar Legi sebelum revitalisasi. Pengelolaan pasar pada saat ini pun lebih tertata, pembagian kios maupun toko digolongkan menurut jenis dagangan sehingga pembeli lebih nyaman berbelanja.

Selain pengelolaan pada sisi pedagang, pengelolaan kebersihan pasar nampak sekali perbedaan dari pasar sebelumnya, Pasar Legi saat ini lebih bersih dan keamanan baik bagi pedagang maupun pembeli sangat diperhatikan dengan ditunjang adanya CCTV dan petugas keamanan dari pengelolaan pasar yang ada. Dengan segala fasilitas penunjang baru yang diberikan pada Pasar Legi demi menunjang aksesibilitas pedagang dan pembeli, nampaknya upaya pemerintah belum sepenuhnya sesuai harapan. Hal tersebut dikarenakan adanya kios-kios pada lantai dua pasar yang belum terisi, kios-kios kosong tersebut sebenarnya telah dibeli atau dimiliki oleh pedagang namun tidak ditempati karena sepi pengunjung pada lantai dua Pasar Legi yang pada lantai dua tersebut ditempati oleh pedagang pakaian, sepatu, dan makanan. Untuk mengatasi masalah tersebut nampaknya pemerintah melalui Kantor Pengelolaan Pasar Daerah mengupayakan strategi agar lantai dua pasar dapat lebih diminati oleh pembeli yaitu dengan merencanakan pembangunan bioskop, karaoke *café*, *play ground* dan *food court* pada lantai dua pasar bagian depan. Dari rencana pembangunan fasilitas baru tersebut, *food court*, bioskop dan karaoke *café* pada saat ini sudah mulai beroperasi.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Legi Kota Blitar

a. Aktor-aktor Pelaksana Kebijakan

Pasar merupakan tempat distribusi barang yang juga sebagai pusat perekonomian masyarakat setempat. Seperti halnya Pasar Legi, pasar tersebut merupakan pasar induk dan pusat distribusi barang di Kota Blitar. Sebagai pasar induk, tentunya Pasar Legi memerlukan fasilitas-fasilitas penunjang yang memadai. Untuk itu pemerintah Kota Blitar berupaya memberikan beberapa fasilitas umum pada Pasar Legi melalui revitalisasi pasar. Revitalisasi pasar tersebut dilakukan pada tahun 2003 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001. Revitalisasi Pasar Legi selesai pada tahun 2004 dan diresmikan bersama dengan tiga fasilitas umum lainnya.

Kebijakan revitalisasi Pasar Legi merupakan bagian dari Rencana Strategis Kota Blitar tahun 2001-2010. Kebijakan revitalisasi pasar berarti memberikan arahan pada penerapan tujuan-tujuan pembangunan melalui program-program dan proyek. Program dan proyek tersebut tentunya perlu adanya implementasi, dan implementasi kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak-pihak atau aktor-aktor yang terkait dengan kebijakan tersebut. Dalam hal implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Legi, pemerintah melibatkan koordinasi dengan beberapa dinas terkait. Sebagai mana yang dijelaskan oleh Bapak Arianto, S.Sos, M.Si selaku Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar:

“Tentunya dalam pengelolaan pasar saat ini yaitu pengimplementasian kebijakan revitalisasi, kami bekerjasama dengan beberapa dinas seperti Dinas Perhubungan yang berwenang dalam penertipan lalu lintas di sekitar pasar, Puskesmas Pembantu Sukorejo yang memberikan bantuan pada pos kesehatan yang ada dalam pasar, Kepolisian wilayah Kota Blitar yang berwenang terhadap keamanan pasar, Dinas Kebersihan Pasar yang tentunya sangat berwenang terhadap kebersihan pasar, dan kami juga bekerjasama dengan pihak swasta yaitu investor yang mengelola bioskop, *food court*, serta *play ground* yang rencanya akan dibangun pada lantai dua Pasar Legi ini”(Wawancara pada tanggal 27 Mei 2013 pada pukul 11.30 WIB bertempat di ruang Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Derah Kota Blitar).

Pentingnya koordinasi antara Pengeloaan Pasar dengan pihak-pihak lain yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar sampai saat ini masih terlihat. Dinas Perhubungan perannya sangatlah penting dalam mengatur lalu-lintas yang merupakan bagian dari pemenuhan aksesibilitas pedagang dan pembeli. Lalu-lintas yang tertata dengan baik menentukan pula minat masyarakat untuk datang ke pasar. Selain menata keamanan dan ketertiban berlalu-lintas, Dinas Perhubungan juga berwenang dalam mengatur ketertiban angkutan yang merupakan alat transportasi yang menunjang kelancaran pedagang dan pembeli. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar

Daerah Kota Blitar Arianto, S.Sos, M.Si :

“La kalau tidak ada Dinas Perhubungan, siapa yang mau menata lalu lintas? Siapa yang mau menertipkan angkutan-angkutan di depan itu. Pasar itu tempatnya orang bekerja cepat, kalau lalu-lintas semrawut ya masyarakat malas mau ke pasar kan.” (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2013 pada pukul 12.30 WIB bertempat di ruang Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Berdasarkan pemaparan Bapak Arianto, nampak jelas bahwa koordinasi antara Pengelolaan Pasar Daerah dengan Dinas Perhubungan masih terjalin sampai saat ini. Namun, koordinasi tersebut tidak hanya dengan Dinas Perhubungan saja melainkan dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Sukorejo dan Kepolisian Sukorejo. Dimana Puskesmas Sukorejo bertugas membantu di pos kesehatan yang berada di dalam pasar, pos kesehatan diberikan dalam pasar sebagai fasilitas penunjang untuk pedagang maupun masyarakat sebagai pembeli jika terjadi kecelakaan di dalam pasar. Sedangkan Kepolisian Sukorejo berkoordinasi dengan Kantor Pengelolaan Pasar Daerah bertugas sebagai petugas keamanan yang bertempat pada pos keamanan pasar. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Arianto, S.Sos, M.Si selaku Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar :

“Seperti saya jelaskan tadi, dalam pengelolaan Pasar Legi ini kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas Sukorejo untuk membantu kami dalam pos kesehatan pasar, kami juga bekerjasama dengan Kepolisian Sukorejo yang pos keamanannya ada di depan itu. Nanti kalau pasarnya tidak aman kan ya masyarakat tidak mau belanja ke pasar” (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2013 pada pukul 12.30 WIB bertempat di ruang Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Selain membentuk koordinasi dengan Puskesmas Sukorejo dan Kepolisian Sukorejo, Kantor pengelolaan pasar berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Pasar yang perannya sangat penting dalam memelihara kebersihan pasar. Kebersihan pasar merupakan salah satu tujuan dari kebijakan revitalisasi Pasar Legi yaitu terciptanya pasar yang lebih



nyaman bagi pedagang dan pembeli. Hal ini diungkapkan pula oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar :

“Pasar yang sekarang itu harus bersih lo, kalau pasarnya kayak pasar yang dulu sebelum direnovasi kan sama saja jadinya. Sekarang ya kalau pasarnya kotor, becek-becek, siapa yang mau belanja di sini? Kan ya harus ada pegawai yang bertugas membersihkan pasar, yaitu mereka para petugas dari Dinas Kebersihan Pasar” (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2013 pada pukul 12.30 WIB bertempat di ruang Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Setelah pasar direvitalisasi dan Pengelolaan Pasar Daerah menjalin koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait, pada tahun 2012 pemerintah melalui Pengelolaan Pasar Daerah menjalin koordinasi dengan pihak swasta yaitu investor. Koordinasi dengan investor ini dilakukan untuk mengupayakan pemanfaatan kios pada lantai 2 pasar yang masih terdapat kios-kios kosong yang menjadi beban pemerintah daerah Kota Blitar. Pemerintah melalui Pengelolaan Pasar Daerah menjalin koordinasi dengan pemilik *Jojo Food court*, *karaoke cafe* dan *3D movie*. Hal ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat terhadap lantai 2 pasar, dan pada tahun 2013 ini Pengelolaan Pasar Daerah mengajukan koordinasi dengan investor lagi untuk menciptakan *play ground* yang rencananya akan ditempatkan di lantai 2 pasar bagian belakang yang tentunya juga bertujuan untuk memanfaatkan kios kosong dan menarik kembali minat masyarakat terhadap pasar. Sebagaimana yang telah dijelaskan Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar Arianto, S.Sos, M.Si :

“Mengenai lantai 2 pasar yang terlihat lebih sepi dibanding dengan lantai 1, pada tahun 2012 kami telah menjalin kerja sama dengan *Jojo café*, *food court* dan *mini movie* untuk menarik minat

masyarakat pada lantai 2 pasar ini. Kan dengan adanya bioskop kecil dan *food court* pasar bisa ramai dari pagi sampai malam hari. Dan pada tahun ini kami masih mengajukan permohonan kerjasama dengan infestor lagi untuk membangun *play ground* pada sisi belakang pasar lantai 2 ini. Biar pasar tidak sepi lagi”. (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2013 pada pukul 12.30 WIB bertempat di ruang Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terkait implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Kota Blitar, pemerintah melalui Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar melibatkan beberapa dinas terkait di Kota Blitar. Sampai pada tahun 2013 ini Kantor Pengelolaan Pasar Daerah masih menjalin koordinasi dengan dinas-dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan Pasar, Puskesmas Sukorejo, Kepolisian Sukorejo, dan investor yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meramaikan lantai 2 Pasar Legi.

b. Kondisi Pasar dan Pedagang Pasar Legi

1) Kondisi Umum Pasar Legi

Pasar Legi Kota Blitar terletak di Jl. Mawar Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang merupakan pasar induk dan pusat distribusi barang di Kota Blitar. Pasar Legi dibangun pada tahun 1911 dan telah mengalami beberapa kali pembenahan yaitu pada tahun 1977 dan 1999. Pembenahan bangunan pada kedua tahun tersebut bukan merupakan pembenahan secara total namun hanya pembenahan pada beberapa bangunan yang rusak saja. Hingga pada tahun 2003 pemerintah merasa bahwa Pasar Legi pada saat itu sudah sangat tidak memadai bangunannya, maka pada tahun 2003 tersebut pemerintah melakukan revitalisasi pasar

bersama tiga fasilitas umum lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kota Blitar 2001-2010 Pemerintah Daerah Kota Blitar mengenai pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pasar Legi sebagai pasar induk dan pusat distribusi barang direvitalisasi. Proses revitalisasi selesai pada tahun 2004 dengan fisik bangunan yang tentunya lebih baik dari Pasar Legi lama.

Pasar Legi pada saat ini berdiri dengan 2 lantai bangunan, lantai 1 didominasi dengan pedagang bahan-bahan pokok dan lantai 2 berisi kios pakaian dan makanan jadi. Pasar Legi berdiri di atas tanah seluas 17.883 m² yang di dalamnya terdiri dari 791 kios dan 929 los yang dilengkapi dengan lahan parkir seluas 400 m². Total jumlah pedagang di pasar legi 1.720 pedagang yang merupakan pedagang lama yaitu pedagang yang telah berjualan sebelum pasar direvitalisasi dan pedagang baru yang mulai berjualan semenjak pasar direvitalisasi. Pasar Legi setelah direvitalisasi semakin menambah fasilitas penunjang seperti radio pasar, musholla, MCK, CCTV dan informasi serta keamanan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar Peny Setyorini, S.Sos :

“Semua fasilitas penunjang seperti radio pasar, musholla, MCK, CCTV, informasi serta keamanan merupakan fasilitas baru semua. Pada Pasar Legi yang dulu fasilitas seperti itu tidak ada.”(Wawancara pada tanggal 10 Mei 2013 pada pukul 14.00 WIB bertempat di ruang tata usaha Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Berdasarkan uraian di atas, kondisi Pasar Legi saat ini berbeda dengan Pasar Legi sebelum revitalisasi. Dengan revitalisasi, banyak

fasilitas baru yang diberikan untuk menambah kenyamanan aksesibilitas pedagang dan pembeli. Kondisi Pasar Legi saat ini telah mengutamakan aksesibilitas yaitu pemberian kelengkapan fasilitas bagi pedagang maupun pembeli pada pasar.

2) Jumlah dan jenis pedagang Pasar Legi

Pasar Legi Kota Blitar saat ini memiliki 2 lantai bangunan yang memiliki 791 kios dan 929 los. Pada lantai 2 pasar kios diisi oleh pedagang pakaian, sepatu, sandal, jilbab, tas, dan makanan jadi. Sedangkan lantai 1 pasar kios diisi oleh pedagang pakaian, tas, sepatu dan sandal, barang pecah belah, makanan jadi, sayur sayuran, daging dan ikan, buah-buahan, serta kebutuhan pokok lainnya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Peny Setyorini, S.Sos :

“Di sini lengkap mbak, semua ada. Mulai dari pedagang sayuran sampai salon ada di pasar ini. Mau mencari sabit atau parang ya ada di pasar ini.”(Wawancara pada tanggal 10 Mei 2013 pada pukul 14.00 WIB bertempat di ruang tata usaha Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Dari 1.720 pedagang di Pasar Legi, jumlah tersebut telah mencakup semua pedagang baik yang menempati kios maupun pedagang yang tidak berada di dalam kios pasar. Pedagang yang tidak masuk dalam kios pasar merupakan pedagang lesehan yang berada di pelataran bekas terminal lama Kota Blitar yang memang letaknya bersebelahan dengan lokasi bangunan Pasar Legi. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar Arianto, S.Sos, M.Si:

“Pedagang yang berjualan di ex-terminal itu namanya pedagang lesehan, jumlahnya itu sudah termasuk dalam 1.720 pedagang itu.

Kami belum ada data yang menjelaskan berapa jumlah total pedagang lesehannya. Kan pedagang lesehan hanya berjualan dari pukul 06.00-11.00. Mengenai jumlah pedagang menurut jenis dagangannya itu kami juga belum memiliki data. Pokok segala jenis kebutuhan pokok tersedia di pasar ini”(Wawancara pada tanggal 27 Mei 2013 pada pukul 12.30 WIB bertempat di ruang Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Berdasarkan penjelasan tersebut, hampir semua jenis pedagang ada dalam Pasar Legi. Namun jumlah pedagang menurut jenis dagangannya belum dapat diketahui jumlahnya, hal ini dikarenakan Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar belum memiliki data jumlah pedagang menurut jenis dagangannya. Sehingga hanya dapat diketahui jumlah pedagang secara keseluruhan baik yang menempati kios ataupun yang tidak menempati kios yaitu pedagang lesehan.

c. Komunikasi yang Dilakukan Oleh Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar dan Penataan pedagang

Revitalisasi Pasar Legi merupakan perwujudan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Stategis Kota Blitar Tahun 2001-2010 mengenai pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pasar Legi sebagai pasar induk dan pusat distribusi barang dan tahapan pembangunan Kota Blitar. Pelaksanaan revitalisasi dimulai pada tahun 2003 dan selesai pada Oktober tahun 2004. Setelah revitalisasi selesai, sampai pada saat ini pemerintah melalui Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar masih sesekali melakukan pembenahan pada setiap fasilitas Pasar Legi. Untuk mengelola dan melakukan pembenahan terhadap fasilitas pasar Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar menjalin



koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan Pasar, Kepolisian Sukorejo, Puskesmas Sukorejo dan para investor. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar Arianto, S.Sos, M.Si :

“Tentunya dalam pengelolaan pasar saat ini yaitu pengimplementasian kebijakan revitalisasi, kami bekerjasama dengan beberapa dinas seperti Dinas Perhubungan yang berwenang dalam penertipan lalu lintas di sekitar pasar, Puskesmas Pembantu Sukorejo yang memberikan bantuan pada pos kesehatan yang ada dalam pasar, Kepolisian wilayah Kota Blitar yang berwenang terhadap keamanan pasar, Dinas Kebersihan Pasar yang tentunya sangat berwenang terhadap kebersihan pasar, dan kami juga bekerjasama dengan pihak swasta yaitu investor yang mengelola bioskop, *food court*, serta *play ground* yang rencanya akan dibangun pada lantai dua Pasar Legi ini”(Wawancara pada tanggal 27 Mei 2013 pada pukul 11.30 WIB bertempat di ruang Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah melalui Kantor Pengelolaan Pasar Daerah sampai pada saat ini selalu menjalin koordinasi dengan Dinas Perhubungan yang berwenang dalam mengatur lalu lintas di sekitar pasar. Selain itu, koordinasi juga dijalin dengan Dinas Kebersihan Pasar yang bertanggung jawab dengan kebersihan pasar karena kebersihan pasar juga merupakan salah satu daya tarik masyarakat untuk datang ke pasar. Koordinasi dengan Kepolisian daerah Sukorejo dilakukan untuk menjamin keamanan pasar, serta adanya koordinasi dengan investor dilakukan untuk membangun beberapa fasilitas umum baru di lantai 2 pasar yaitu bioskop, *food court* dan *play ground*.

Mengenai penataan pedagang mulai dari awal penataan setelah revitalisasi sampai pada saat ini, Kantor Pengelolaan Pasar Daerah tidak

menjalain koordinasi dengan pihak manapun baik organisasi formal maupun informal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar Arianto, S.Sos, M.Si :

“Dari awal penataan pedagang untuk menempati kios-kios baru di dalam pasar ini, kami tidak menjalin kerjasama dengan pihak manapun semisal Satuan Polisi Pamong Praja. Kami Pengelolaan Pasar menata sendiri bersama peguyupan pedagang pada saat perpindahan pedagang dari kios sementara pada saat revitalisasi ke kios baru yang sekarang pedagang tempati.”(Wawancara Pada Tanggal 27 Mei 2013 pada pukul 12.30 WIB bertempat di ruang Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah melalui Kantor Pengelolaan Pasar menjalin koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan Pasar, Puskesmas Sukorejo, Kepolisian Sukorejo, dan investor dalam hal pemeliharaan atau pengelolaan fasilitas pasar. Sedangkan yang berkaitan dengan pedagang dan penataan pedagang, Kantor Pengelolaan Pasar tidak menjalin koordinasi dengan organisasi formal dan hanya menjalin kersasama atau koordinasi dengan peguyupan pedagang.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi Pemerintah Kota Blitar dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar pada Pasar Legi Kota Blitar

a. Faktor Pendukung

Revitalisasi Pasar Legi Kota Blitar sudah terlaksana semenjak tahun 2004. Sejak saat itu, implementasi kebijakan telah dilaksanakan oleh aktor-aktor yang berkewajiban melaksanakan kebijakan. Meskipun implementasi kebijakan telah dilaksanakan sampai sekarang, tentunya ada faktor yang menyebabkan proses implementasi kebijakan dapat terlaksana

sampai saat ini baik faktor dari dalam instansi dan pasar ataupun lingkungan di luar pasar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar Arianto, S.Sos, M.Si :

“Faktor yang mendukung kebijakan revitalisasi Pasar Legi ini dapat berjalan dengan baik saya rasa banyak ya. Seperti fisik bangunan yang sudah sesuai dengan seharusnya, sehingga Pasar Legi layak menjadi pasar induk. Pedagang-pedagang yang mempunyai etika, sehingga pedagang mudah dikendalikan dan menarik pembeli, kalau pedagang gag beretika ya pembeli kan gag mau datang. Adanya koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait sehingga fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat itu terpenuhi. Banyak lah faktor pendukungnya.” (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2013 pada pukul 12.30 WIB bertempat di ruang Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Berdasarkan penjelasan tersebut, faktor internal yang mendukung dalam implementasi kebijakan revitalisasi pasar saat ini adalah adanya koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa koordinasi yang sampai pada saat ini masih dijalin oleh Kantor Pengelolaan Pasar Daerah yaitu dengan Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan Pasar, Puskesmas Sukorejo, Kepolisian Sukorejo, dan investor mampu mendukung upaya pemenuhan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang mendukung kelancaran aktifitas pedagang dan pembeli. Pemenuhan fasilitas dan pengelolaan fasilitas umum dalam Pasar Legi tersebut termasuk dalam tujuan revitalisasi pasar. Selain itu, pedagang pasar juga turut mendukung implementasi kebijakan. Pedagang pasar yang memiliki etika sehingga petugas Pengelolaan Pasar mudah dalam mengendalikan pedagang, serta pedagang yang beretika

mampu menjaga fasilitas umum yang memang disediakan untuk memenuhi kebutuhan tidak hanya pedagang tetapi juga pembeli di pasar.

b. Faktor Penghambat

Setiap pelaksanaan kebijakan pasti terdapat kendala serta pendukung kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan lancar atau tidak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Arianto, S.Sos, M.Si selaku Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar mengatakan bahwa pasti jika ada pendukung akan ada penghambat atau kendalanya (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2013 pada pukul 12.30 WIB bertempat di ruang Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Ada beberapa faktor pendukung implementasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bapak Arianto, S.Sos, M.Si selaku Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar menyampaikan pula ada pula kendala yang dihadapi saat implementasi kebijakan revitalisasi pasar.

Sebagaimana yang dijelaskan beliau bahwa :

“Kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar khususnya pengelolaan fasilitas umum pada Pasar Legi ini adalah masih adanya bangunan yang belum terisi. Hal itu menyebabkan lantai 2 pasar masih sepi. Ada pula kendala dari pedagang yang belum beretika, sehingga terkadang kami sulit untuk menata pedagang-pedagang tersebut. Pemeliharaan fasilitas juga menjadi kendala, karena saat ini sudah ada beberapa fasilitas pasar yang mulai rusak. Pemeliharaan fasilitas kan butuh biaya dan kesadaran pengguna, kedua hal itu adalah kendala yang masih kita tangani.” (Wawancara pada tanggal 27 Mei 2013 pada pukul 12.30 WIB bertempat di ruang Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kendala atau faktor penghambat yang dialami oleh Pengelolaan

Pasar Daerah dalam melaksanakan kebijakan revitalisasi. Kendala yang bertama adalah tentang pemeliharaan fasilitas umum yang disediakan untuk pedagang maupun pengunjung pasar. Pemeliharaan fasilitas memerlukan kesadaran dari pengguna fasilitas yaitu pedagang dan pembeli, kesulitan petugas adalah untuk membangun kesadaran pedagang dan pembeli untuk bersama-sama memelihara fasilitas umum yang disediakan. Saat ini sudah ada beberapa fasilitas yang sudah rusak dan kendala berikutnya adalah masalah pendanaan untuk perbaikan fasilitas umum tersebut.

Faktor penghambat atau kendala berikutnya adalah mengenai pedagang yang belum beretika. Masih adanya pedagang yang sulit diatur oleh petugas baik dalam pengaturan tempat maupun masalah biaya-biaya sewa yang harus dibayarkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Peny Setyorini, S.Sos selaku Kepala Bidang Tata Usaha Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar bahwa:

“Setiap pedagang itu wataknya tidak sama, kadang ada yang baik tertib bayar sewa ada yang sulit diatur. Seperti pedagang lesehan itu tidak mau menempati kios-kios, ada juga pedagang yang marah-marah dan sulit ditagih biaya sewa kios. Petugas lagi yang susah kan.”(Wawancara pada tanggal 10 Juni 2013 pada pukul 14.00 WIB bertempat di ruang Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi pemerintah melalui Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar adalah masalah pedagang yang belum mempunyai etika yang menimbulkan kesulitan bagi petugas dari Kantor Pengelolaan Pasar

Daerah untuk menertibkan pedagang yang bertujuan untuk memenuhi kios-kios kosong di dalam pasar. Selain itu ditambah dengan adanya beberapa pedagang yang menunggak biaya sewa kios. Selain masalah pedagang, kendala yang dihadapi pemerintah melalui Pengelolaan Pasar adalah mengenai adanya kios kosong pada lantai 2 yang mengakibatkan pasar sepi dan membuat pedagang pada lantai 2 pasar mengeluh. Adanya kios kosong mengakibatkan pembeli malas untuk berkunjung atau berbelanja di lantai 2, dan hal ini menyebabkan keresahan pedagang. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Arianto, S.Sos, M.Si selaku Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar bahwa:

“Saat ini kendala yang sedang diupayakan pemecahannya adalah masalah kios-kios yang tidak ditempati pada lantai 2. Kios-kios kosong mengakibatkan pembeli malas untuk ke lantai 2 sehingga lantai 2 jadi sepi.”(Wawancara pada tanggal 27 Mei 2013 pada pukul 12.30 WIB bertempat di ruang Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui jika masalah masih adanya kios kosong yang terdapat pada lantai 2 pasar mengakibatkan pembeli malas untuk berbelanja pada lantai 2 sehingga pasar khususnya lantai 2 menjadi lebih sepi. Sepinya pasar pada lantai 2 tersebut mengakibatkan pedagang mengeluh, hal tersebut selain menjadi kendala pemenuhan aksesibilitas pedagang dan pembeli pada Pasar Legi juga mengakibatkan PAD dari Pasar Legi tidak memenuhi target.

3. Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Legi Terhadap Aksesibilitas Pedagang dan Pembeli

a. Dampak Pedagang

Revitalisasi pasar merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Blitar melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 yang ditujukan untuk membangun fasilitas umum masyarakat. Kebijakan revitalisasi pasar juga memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pedagang dalam pasar melalui peningkatan fasilitas dan upaya peningkatan pendapatan pedagang. Peningkatan aksesibilitas yaitu peningkatan fasilitas untuk pedagang yang diberikan melalui kebijakan revitalisasi pasar adalah perbaikan pada fasilitas kios dalam pasar. Melalui revitalisasi, pemerintah membangun kios-kios yang lebih memadai untuk pedagang.

Peningkatan aksesibilitas yaitu fasilitas yang diberikan pada pedagang adalah fasilitas secara fisik antara lain kios yang lebih luas dan bersih serta penerangan yang lebih baik. Hal tersebut dikatakan pula oleh salah seorang pedagang pakaian pada lantai 1 Pasar Legi bernama Ratna mengatakan bahwa bangunan yang sekarang lebih enak, terang dan lebih luas sehingga berjualan menjadi lebih mudah (Wawancara pada tanggal 1 Juni 2013 pada pukul 10.00 WIB bertempat di kios pakaian Ratna Busana dalam Pasar Legi).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui jika pedagang pada lantai 1 merasakan dampak yang baik dari kebijakan revitalisasi pasar. Revitalisasi pasar membuat pedagang pada lantai 1 merasa mudah

untuk berjualan karena aksesibilitas melalui fasilitas fisik pasar menjadi lebih baik. Pendapat serupa juga dikatakan oleh pemilik toko asesoris bernama Nita bahwa:

“Kalau masalah tempat enak yang sekarang. Pasarnya lebih luas, kiosnya lebih bersih, fasilitas ya lebih lengkap. Tapi ya itu, kalau jualan enak jaman dulu, pedagang tidak sebanyak sekarang jadi persaingan jualan tidak sesulit sekarang.”(Wawancara pada tanggal 1 Juni 2013 pada pukul 10.00 WIB bertempat di kios acecoris Endita dalam Pasar Legi).

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa revitalisasi pasar memberikan dampak positif terhadap pedagang melalui perbaikan fisik bangunan yang membuat pedagang juga merasa nyaman dalam berjualan. Namun dampak positif yang dirasakan oleh pedagang juga memberikan dampak yang kurang baik terhadap persaingan dagang. Bangunan yang lebih luas tentunya menambah jumlah pedagang, sehingga persaingan dagang semakin ketat. Hal ini juga dirasakan oleh pedagang sembako bernama Bapak Ros, beliau mengatakan bahwa:

“Kula dagang saking tahun 1969, nanging laris riyen. Sakniki saingane katah, kalah kaleh ingkang modal e gede. Fasilitas nggeh sami mawon kaleh riyen, malah sakniki angsal kios dating nglebet.”(Wawancara pada tanggal 1 Juni 2013 pada pukul 10.00 WIB bertempat di kios sembako dalam Pasar Legi).

Bernyataan serupa juga diungkapkan oleh Ibu Pujiati yaitu pedagang buah bahwa :

“Saya jualan di sini mulai kelas 4 SD jadi meneruskan jualan orang tua. Kalau jualan enak di pasar yang dulu, rame setiap hari. Sekarang yang jualan jadi tambah banyak, fasilitas juga sama saja.”(Wawancara pada tanggal 1 Juni pada pukul 11.00 WIB bertempat di los buah dalam Pasar Legi).

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan dari karyawan pedagang pakaian di lantai 2 Pasar Legi bahwa:

“Dulu waktu pasar masih bangunan lama kios kita ada di depan jadi jualannya laris, sekarang kiosnya dapat di dalam pasar jadi ya kalah sama yang lain.” (Wawancara pada tanggal 1 Juni 2013 pada pukul 11.00 WIB bertempat di kios pakaian Gaul dalam Pasar Legi).

Dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang yang kiosnya ada di pasar bagain dalam, dapat diketahui bahwa pedagang merasa aksesibilitasnya yaitu pemberian fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui pembaharuan pasar ini tidak begitu memberikan dampak positif. Beberapa pedagang merasa bahwa fasilitas yang diberikan sama saja. Bahkan ada pedagang yang dahulu memiliki kios di depan pasar, setelah revitalisasi mendapatkan kios di dalam pasar. Hal ini dikarenakan pasar bagian depan adalah toko-toko yang tentunya memiliki harga sewa yang lebih mahal dibandingkan dengan kios di dalam pasar. Sebagaimana yang dialami oleh pedagang buah bernama Rina yang memiliki kios tepat di depan parkir los buah yang kiosnya mudah dijangkau oleh pembeli dan kiosnya tampak lebih lengkap dan moderen dibandingkan dengan kios-kios yang lain, mengatakan bahwa kios yang ditempati sekarang menjadi lebih terang dan luas dengan posisi kios yang strategis sehingga menarik minat pembeli (Wawancara pada tanggal 1 Juni 2013 pada pukul 11.30 WIB bertempat di kios buah Pasar Legi).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui jika dampak yang ditimbulkan karena kebijakan revitalisasi pasar terhadap pedagang adalah

dampak negatif serta positif. Dampak negatif dialami oleh pedagang yang memiliki modal tidak terlalu besar, hal ini dapat diketahui dengan melihat letak atau posisi kios yang berada di dalam pasar yang harga sewa kiosnya adalah Rp 150.000,00 berbulan dengan luas kios yang hanya 3 x 4 m². Dengan kios yang tidak terlalu besar dan berada di dalam pasar maka pedagang merasa bahwa fasilitas yang diberikan melalui revitalisasi pasar belum begitu dapat dinikmati oleh pedagang, para pedagang merasa dengan revitalisasi membuat persaingan dagang menjadi semakin ketat.

Selain dampak negatif, revitalisasi pasar juga memberikan dampak positif terhadap pedagang yang memiliki lebih banyak modal. Karena pedagang yang merasakan perbedaan dari revitalisasi pasar adalah pedagang yang menempati kios yang letaknya strategis. Kios tersebut memiliki ukuran 6 x 8,4 m² dengan harga sewa Rp 750.000,00 berbulan. Kios-kios berukuran besar tersebut juga memiliki fasilitas penerangan yang lebih baik sehingga membantu dalam penarikan pembeli. Selain itu, kios-kios tersebut berada dekat dengan tempat parkir dan pintu masuk sehingga mudah dijangkau oleh pembeli.

b. Dampak Masyarakat

Kebijakan revitalisasi Pasar Legi dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 ditujukan untuk membangun fasilitas umum masyarakat. Revitalisasi Pasar Legi diikuti dengan perbaikan 3 fasilitas umum masyarakat lainnya. Kebijakan revitalisasi Pasar Legi memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah mengenai peningkatan pelayanan kepada

masyarakat Kota Blitar dan sekitarnya karena pengunjung Pasar Legi tidak hanya masyarakat Kota Blitar saja. Pasar Legi dijadikan sebagai pasar induk dan pusat distribusi barang yang menjadi salah satu keunggulan Kota Blitar.

Masyarakat merupakan pembeli dan obyek dari kebijakan revitalisasi pasar. Oleh karena itu masyarakat tentunya merasakan dampak dari kebijakan revitalisasi pasar yaitu Pasar Legi. Peningkatan pelayanan untuk masyarakat diwujudkan dengan membangun fasilitas-fasilitas baru dalam pasar. Upaya pemerintah tersebut memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat seperti yang dijelaskan oleh salah seorang pembeli bernama Dian bahwa :

“Enak berbelanja di pasar yang sekarang mbak, tempatnya lebih luas, lebih bersih, lebih aman, tempat parkirnya juga banyak. Pokoknya enak berbelanja di pasar yang sekarang.”(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2013 pada pukul 11.30 WIB bertempat di los buah Pasar Legi).

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh pembeli yang bernama Wiwik bahwa:

“Ya lebih enak belanja di pasar yang sekarang mbak, *wong* pasar yang sekarang kan lebih luas, meskipun tidak terlalu bersih tapi lebih bersih sekarang dari pada dulu. Bahan-bahan pokok yang dijual juga lebih lengkap.”(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2013 pada pukul 12.00 WIB bertempat di los sayuran Pasar Legi).

Dari kedua wawancara di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat sebagai pembeli dan sasaran dari kebijakan revitalisasi pasar merasa bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memenuhi kebutuhan fasilitas yang ada di dalam pasar.

Pasar yang telah direvitalisasi memberikan kenyamanan masyarakat dalam berbelanja. Pembeli yang terbiasa berbelanja di lantai 1 pasar merasa sudah menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui revitalisasi pasar. Namun hal tersebut sedikit berbeda dengan yang dijelaskan oleh pembeli yang berbelanja di lantai 2 pasar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ririn yaitu pembeli yang biasa berbelanja di lantai 2 bahwa :

“Belanja di lantai 2 itu tidak nyaman di lantai 1, di sini lebih panas udaranya, yang dijual juga kebanyakan pakaian. Pengamennya juga banyak, jadi kadang-kadang risih. Kalau di lantai 1 kan lengkap, kebanyakan orang ke pasar kan juga beli sembako mbak.”(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2013 pada pukul 13.00 WIB bertempat di los pakaian lantai 2 Pasar Legi).

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dampak dari revitalisasi pasar sudah dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pembeli. Pembeli merasa lebih nyaman berbelanja di pasar setelah direvitalisasi karena adanya peningkatan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui revitalisasi. Melalui kebijakan revitalisasi Pasar Legi, dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah dampak positif karena masyarakat sebagai pembeli sudah merasa puas dengan peningkatan fasilitas umum di dalam pasar.

Tidak hanya masyarakat sebagai pembeli, namun masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Pasar Legi juga merasakan dampak dari kebijakan revitalisasi pasar ini. Masyarakat sekitar Pasar Legi merasakan dampak positif dari kebijakan revitalisasi pasar tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Marianti yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan

Pasar Legi mengatakan bahwa setelah revitalisasi pasar jadi lebih bersih, sehingga lingkungan sekitar pasar jadi ikut bersih. Pedagang dalam pasar juga menjadi tambah banyak sehingga memudahkan berbelanja (Wawancara pada tanggal 3 Juni 2013 pada pukul 14.30 WIB bertempat di lingkungan ex-terminal Pasar Legi).

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Eko yaitu warga sekitar lingkungan Pasar Legi, mengatakan bahwa:

“Sakwise pasar dibangun, cah enom daerah kene podu oleh kerjaan. Bocah-bocah podu dadi tukang parkir soal e panggonan parkir e tambah ombo.” (Wawancara pada tanggal 1 Juni 2013 pada pukul 10.00 WIB bertempat di tempat parkir Jl. Mawar).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui jika kebijakan revitalisasi pasar memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Dampak positif yang dirasakan tidak hanya pada masyarakat sebagai pembeli dalam Pasar Legi tetapi juga masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan sekitar Pasar Legi. Jika masyarakat sebagai pembeli merasakan peningkatan fasilitas berupa kenyamanan dan keamanan dalam berbelanja, masyarakat lingkungan sekitar Pasar Legi merasakan dampak yaitu kebersihan lingkungan dan memperoleh lapangan kerja baru.

c. Dampak Organisasional

Kebijakan revitalisasi pasar selain memberi dampak pada pedagang dan masyarakat sebagai pembeli, kebijakan revitalisasi ini juga memberikan dampak pada organisasi formal. Organisasi formal yang terkena dampak kebijakan revitalisasi ini adalah dinas yang bertugas

mengelola Pasar Legi sebelum revitalisasi. Sebelum revitalisasi dilakukan, Pasar Legi dikelola sepenuhnya oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Arianto, S.Sos, M.Si selaku Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar bahwa:

“Sebelum direvitalisasi Pasar Legi ditangani sepenuhnya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Blitar. Baru setelah revitalisasi, kewenangan sepenuhnya pada Pengelolaan Pasar.”(Wawancara pada tanggal 27 Mei 2013 pada pukul 12.30 WIB bertempat di ruang Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa revitalisasi pasar memberi dampak pula pada perubahan kewenangan pada dinas yang menangani pasar. Selain memberikan dampak yaitu perubahan kewenangan, revitalisasi pasar juga memberikan dampak pada perubahan organisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar Bapak Arianto, S.Sos, M.Si bahwa:

“Setelah revitalisasi pasar tidak lagi dikelola oleh Dispenda, jadi Pengelolaan Pasar yang berwenang atas pasar. Sekarang Dispenda jadi DPKD yang mengurus kas daerah.”(Wawancara pada tanggal 27 Mei 2013 pada pukul 12.30 WIB bertempat di ruang Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa revitalisasi pasar juga memberikan dampak pada organisasi khususnya organisasi formal yang menangani pasar. Dinas Pendapatan Daerah Kota Blitar tidak lagi bertugas menangani pengelolaan pada Pasar Legi dan juga beberapa pasar lainnya di Kota Blitar. Setelah revitalisasi Pasar Legi, Dinas Pendapatan Daerah Kota Blitar digantikan dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertugas mengurus dan mengelola keuangan serta pendapatan

daerah Kota Blitar. Sedangkan pengelolaan Pasar Legi diserahkan secara penuh pada Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar yang juga memiliki wewenang penuh pada beberapa pasar di Kota Blitar seperti Pasar Pon, Pasar Templek, Pasar Dimoro, dan Pasar Pahing. Jadi dengan adanya kebijakan revitalisasi pasar pada Pasar Legi, dampak yang ditimbulkan pada organisasi formal adalah penyerahan kewenangan pengelolaan Pasar Legi dari Dinas Pendapatan Daerah kepada Kantor Pengelolaan Pasar Daerah dan dihapusnya Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Dampak Fisik

Pasar Legi merupakan pasar tradisional yang dibangun pada tahun 1911. Setelah dibangun, Pasar Legi mengalami dua kali pembenahan pada tahun 1997 dan 1999 namun pembenahan hanya dilakukan pada beberapa bagian bangunan pasar yang rusak. Pada tahun 2003 bangunan Pasar Legi dirasa sudah tidak memadai untuk digunakan sehingga Pemerintah Kota Blitar melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 memutuskan untuk merevitalisasi Pasar Legi.

Tujuan dari direvitalisasinya Pasar Legi adalah untuk meningkatkan kenyamanan bagi pembeli dan pedagang dalam pasar serta meningkatkan PAD Kota Blitar. Kenyamanan tersebut diwujudkan dengan peningkatan fasilitas umum yang merupakan bagian dari aksesibilitas pedagang dan pembeli. Peningkatan fasilitas pada Pasar Legi diwujudkan dengan merevitalisasi pasar yang dimulai pada tahun 2003 dan selesai

serta diresmikan pada tahun 2004. Kebijakan revitalisasi pasar menimbulkan dampak pada fisik bangunan pasar. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Arianto, S.Sos, M.Si selaku Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar bahwa:

“Kalau dampak fisik pasti ada, revitalisasi kan memang untuk merubah bangunan menjadi lebih layak. Bangunan sekarang sama dulu jelas berbeda, yang sekarang lebih permanen dan lebih bagus. Sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah.”(Wawancara pada tanggal 27 Mei 2013 pada pukul 12.30 WIB bertempat di ruang Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dampak fisik jelas terjadi setelah revitalisasi pasar. Bangunan Pasar Legi setelah revitalisasi jauh berbeda dengan pasar yang dahulu. Kios dan los pada pasar bertambah dan bangunan pasar lebih permanen. Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu pedagang pakaian bernama Ratna mengatakan bahwa bangunan yang sekarang lebih enak, terang dan lebih luas sehingga berjualan jadi lebih mudah (Wawancara pada tanggal 1 Juni 2013 pada pukul 10.00 WIB bertempat di kios pakaian Ratna Busana dalam Pasar Legi).

Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa dampak fisik dari kebijakan revitalisasi pasar merupakan dampak positif. Pedagang sebagai penikmat fasilitas merasakan dampak positif dari revitalisasi tersebut yaitu fisik pasar setelah revitalisasi menjadi lebih terang dan kios-kios yang ada menjadi lebih longgar. Selain itu, beberapa fasilitas fisik juga bertambah dalam pasar. Seperti yang diungkapkan oleh Peny Setyorini, S.Sos selaku

Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar
bahwa :

“Semua fasilitas penunjang seperti radio pasar, musholla, MCK, CCTV, informasi serta keamanan merupakan fasilitas baru semua. Pada Pasar Legi yang dulu fasilitas seperti itu tidak ada.”(Wawancara pada tanggal 10 Juni 2013 pada pukul 14.00 WIB bertempat di ruang tata usaha Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar).

Berdasarkan penjelasan pada wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dengan revitalisasi pasar dampak fisik juga terjadi dengan bertambahnya fasilitas yang disediakan untuk menunjang fasilitas umum pada Pasar Legi. Dengan kebijakan revitalisasi pasar yang merupakan kebijakan untuk memperbaharui fasilitas umum yang sudah ada, dampak fisik terhadap bangunan Pasar Legi memang sudah jelas pasti terjadi. Dampak fisik yang ditimbulkan juga merupakan dampak positif karena revitalisasi merupakan pembenahan terhadap fasilitas yang sudah tidak memadai dan dampak tersebut sudah dirasakan oleh pedagang dan pembeli pada Pasar Legi.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Legi Kota Blitar

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan model dari implementasi kebijakan. Dalam memutuskan suatu kebijakan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah ada, tujuan kebijakan penting untuk diketahui. Dalam kebijakan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Legi tujuan

kebijakan ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 mengenai Rencana Strategis Kota Blitar Tahun 2001-2010 tentang fasilitas penunjang Pasar Legi sebagai pasar induk dan pusat distribusi barang.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, terbentuk kebijakan untuk merevitalisasi pasar yaitu Pasar Legi. Kebijakan revitalisasi Pasar Legi memiliki tiga tujuan yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pendapatan pedagang serta meningkatkan pelayanan terhadap pedagang dan pembeli. Untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan, pemerintah menambahkan beberapa fasilitas penunjang pada Pasar Legi. Tujuan kebijakan revitalisasi pasar tradisional pada Pasar Legi dirasa sudah realistis karena dapat dilaksanakan oleh level pelaksana kebijakan yaitu para aktor-aktor pelaksanaan kebijakan. Sehingga kebijakan dapat mengena pada objek kebijakan yaitu para pedagang dan pembeli pada Pasar Legi.

b. Sumber Daya

Anderson dalam Islamy menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok dalam memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 2001:17). Suatu kebijakan akan dikatakan berhasil apabila penerapan kebijakan tersebut sesuai harapan atau tujuan dari penetapan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting, karena implementasi kebijakan tersebutlah dapat dilihat apakah kebijakan tersebut tepat sasaran ataukah salah sasaran.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:145), menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas dan program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau sejenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Sehingga implementasi mencakup beberapa macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang menjalankan program, bertanggung jawab untuk menyediakan sumber-sumber yang diperlukan, untuk implementasi program tersebut. Sumber-sumber tersebut meliputi personil, peralatan, lahan tanah dan terutama dana (uang). Kedua, badan-badan pelaksana membuat rencana-rencana kegiatan dan regulasi agar program menjadi suatu arahan yang kongkrit. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka, menciptakan unit-unit birokrasi untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Sehingga pada akhirnya kegiatan yang dilaksanakan dapat membawa dampak nyata kepada masyarakat sasaran kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan revitalisasi pasar ini, badan-badan pelaksana yang mengkoordinasikan kegiatan dan menjalankan kegiatan yang telah direncanakan adalah organisasi formal dalam pemerintahan. Badan-badan tersebut meliputi Kantor Pengelolaan Pasar Daerah yang berwenang penuh dalam segala kegiatan dalam Pasar Legi, Kantor Pengelolaan Pasar Daerah selanjutnya berkoordinasi dengan beberapa badan terkait dalam menjalankan kebijakan revitalisasi pasar. Pertama adalah Dinas Kebersihan Pasar yang berwenang dan bertugas dalam

pengelolaan kebersihan pasar. Kedua adalah Dinas Perhubungan, dalam implementasi kebijakan revitalisasi pasar ini Dinas Perhubungan memiliki wewenang dan bertanggungjawab dalam mengatur lalu lintas di sekitar pasar dan mengatur jalannya angkutan umum.

Ketiga adalah Dinas Kesehatan Daerah melalui Puskesmas Sukorejo yang membantu Kantor Pengelolaan Pasar Daerah dalam memberikan fasilitas kesehatan dalam pasar. Keempat adalah Kepolisian Sukorejo yang bersama Kantor Pengelolaan Pasar bertugas menjaga keamanan pasar. Dengan adanya koordinasi antara Kantor Pengelolaan Pasar Daerah yang memiliki wewenang penuh terhadap Pasar Legi dengan keempat instansi pemerintahan tersebut sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh Wahab (2001:63) bahwa:

“Dengan kata lain, dalam implementasi program khususnya yang melibatkan banyak organisasi/instansi pemerintahan atau berbagai tingkatan struktur organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yakni: 1. Pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijaksanaan (*the center* atau pusat); 2. Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*); dan 3. Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program tersebut ditujukan, yakni kelompok sasaran (*target group*).”

Implementasi kebijakan revitalisasi pasar ini melibatkan koordinasi pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*) yaitu badan-badan yang terkait dengan pengelolaan pasar setelah revitalisasi. Kantor Pengelolaan Pasar Daerah berkoordinasi dengan organisasi/instansi pemerintahan, dan juga dengan aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan yaitu para investor. Kantor

Pengelolaan Pasar Daerah berkerjasama dengan investor dalam upaya meningkatkan pelayanan melalui pemberian fasilitas tambahan pada pasar berupa *bioskop*, *food court*, dan *play ground*. Selain untuk meningkatkan pelayanan melalui pemberian fasilitas baru pada pembeli, kerjasama dengan investor juga dilakukan oleh pemerintah melalui Kantor Pengelolaan Pasar Daerah untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pasar sehingga pasar menjadi lebih ramai dan memberikan dampak yang baik terhadap pedagang serta meningkatkan target PAD dari Pasar Legi.

c. Kondisi Lingkungan Ekonomi dan Lingkungan Sosial Pasar Legi

Pasar Legi merupakan pasar induk dan pusat distribusi barang di Kota Blitar. Keberadaan Pasar legi sangat diperhitungkan di Kota Blitar karena pada pasar itulah banyak penduduk baik dari dalam Kota Blitar maupun dari luar Kota Blitar mencari kehidupan. Sebagai pasar induk dan pusat distribusi, pemerintah Kota Blitar berusaha meningkatkan aksesibilitas pedagang dan pembeli pada Pasar Legi melalui revitalisasi pasar. Revitalisasi dilaksanakan pada tahun 2003 dan selesai pada Oktober 2004.

Pasar Legi terletak di Jl. Mawar Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Setelah mengalami peremajaan bangunan secara total, Pasar Legi berdiri di atas tanah seluas 17.883 m² dengan 2 lantai bangunan. Sebelumnya Pasar Legi hanya ada 1 bangunan dan lokasi yang digunakan lebih sempit. Kios yang berada di

dalam pasar juga semakin bertambah dengan jumlah 791 kios dan 929 los. Terdapat 2 macam kios dalam Pasar Legi yang sekarang yaitu kios dengan ukuran $6 \times 8,4 \text{ m}^2$ yang memiliki harga sewa Rp 750.000,00 dan kios dengan luas $3 \times 4 \text{ m}^2$ dengan harga sewa Rp 225.000,00 untuk pedagang baru dan Rp 150.000,00 untuk pedagang lama.

Penataan kios pada Pasar Legi saat ini lebih rapi, penataan kios digolongkan dari jenis dagangannya. Seperti kios pakaian diletakkan di lantai 2 dan sebagian diletakkan pada lantai 1 bagian depan, barang pecah belah juga diletakkan pada bagian depan bersebelahan dengan kios pakaian. Untuk bagian belakang pasar terdapat kios sembako, sayur-sayuran mentah, buah-buahan, daging dan ikan. Sedangkan bagian tengah pasar digunakan untuk beraneka jenis pedagang seperti pedagang makanan, arloji, perhiasan, pandai besi, salon dan penjahit. Dengan keaneka ragaman pedagang tersebut maka Pasar Legi sekarang termasuk dalam pasar terlengkap dan terbesar di Kota Blitar.

Dengan semakin luasnya pasar dan semakin bertambah banyak kios, pedagang pasar legi juga semakin bertambah menjadi 1.720 orang pedagang. Bertambahnya kios dan pedagang nyatanya ditunjang dengan semakin luasnya tempat parkir dengan total luas 400 m^2 yang terletak di depan, samping kiri dan kanan, serta di bagian belakang pasar. Selain bertambah kios dan pedagang peremajaan pasar pemerintah juga menambahkan fasilitas tentunya berdampak pada aksesibilitas pedagang dan pembeli. Fasilitas baru yang ada di Pasar Legi adalah Radio Pasar,

musholla, MCK, CCTV, informasi dan keamanan. Fasilitas baru tersebut masih beroperasi dan dapat dimanfaatkan oleh pedagang maupun pembeli sampai sekarang, sehingga dapat diketahui jika kebijakan revitalisasi pasar memberikan dampak yang baik terhadap aksesibilitas yaitu upaya meningkatkan fasilitas umum dalam pasar karena kondisi pasar saat ini terlihat lebih bersih dan nyaman namun kebersihan tersebut sedikit terganggu dengan adanya pedagang lesehan yang terlihat tidak tertata di area ex-terminal.

Jika masyarakat sebagai pembeli merasa nyaman dengan kondisi pasar saat ini, hal tersebut ternyata tidak dirasakan oleh semua pedagang. Kondisi pedagang di area Pasar Legi tidak seluruhnya merasakan keuntungan dari revitalisasi pasar. Aksesibilitas yaitu dalam hal ini menyangkut kelengkapan dan kualitas fasilitas yang diberikan setelah adanya revitalisasi tidak dirasakan oleh semua pedagang. Pedagang yang memiliki modal besar tentunya mendapat kios dengan posisi strategis sehingga mudah dijangkau oleh pembeli dan mendapatkan fasilitas seperti penerangan yang baik. Berbeda dengan pedagang dengan modal yang tidak terlalu besar yang mendapat kios dengan luas hanya $3 \times 4 \text{ m}^2$ dan fasilitas yang diberikan berbeda dengan kios dengan ukuran besar. Hal ini mengakibatkan banyak pedagang tidak merasakan adanya penambahan fasilitas dari kebijakan revitalisasi pasar.

Jumlah pedagang dalam Pasar Legi adalah 1.720 pedagang dengan beraneka jenis dagangan. Dengan jumlah yang cukup besar tersebut pedagang tentunya mengalami kesulitan dalam persaingan. Para pedagang yang telah berjualan sejak pasar belum mengalami revitalisasi secara total pada tahun 2003 merasa bahwa peremajaan pasar yang mengakibatkan bertambahnya pedagang baru dengan modal yang besar mengakibatkan pedagang lama merasa tidak beruntung karena persaingan semakin ketat dan fasilitas baru tidak begitu mereka nikmati. Banyak pedagang lama yang mendapatkan kios di dalam pasar dengan posisi dan luas kios yang kurang strategis sehingga para pedagang tersebut merasa fasilitas yang diberikan antara pasar dahulu sebelum revitalisasi dan pasar setelah revitalisasi sama saja. Sehingga kondisi pedagang saat ini tidak merata, kesenjangan modal sangat terlihat. Pedagang dengan modal besar semakin laris dan pedagang dengan modal tidak terlalu besar sulit untuk mendapatkan pembeli.

d. Komunikasi yang Dilakukan Oleh Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar dan Penataan Pedagang

Dalam studi tentang implementasi kebijakan, terdapat beberapa model yang bertujuan memberikan kemudahan dalam memahami proses implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Mentter dan Van Horn yang dikenal dengan *A Model of Policy Implementation* (Wahab, 2001:78). Terdapat enam

variabel yang menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi implementasi. Variabel tersebut meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Dalam implementasi kebijakan revitalisasi pasar ini, variabel komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana menjadi bahasan penting. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Blitar ini memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah meningkatkan PAD. Masalah alokasi potensi daerah tentunya berhubungan dengan ekonomi politik seperti yang dijelaskan oleh Staniland dalam Deliarnov (2006:8) menjelaskan bahwa:

“mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial: hubungan antara politik dan ekonomi. Isu ini memiliki dua sisi baik eksplanatori maupun normatif. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling terkait dan mengenai bagaimana seharusnya mereka terkait”

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ekonomi politik merupakan cabang ilmu sosial yang kemudian berkembang menjadi ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan negara

dan peningkatan sumber daya negara. Melalui pasar, kepentingan ekonomi muncul pada salah satu sasaran kebijakan yaitu meningkatkan pendapatan daerah. Untuk mencapai sasaran yaitu peningkatan PAD, selain itu juga untuk meningkatkan pelayanan bagi pedagang dan pembeli perlu adanya komunikasi atau koordinasi yang selalu dijalani oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan pasar.

Sampai pada saat ini, komunikasi atau koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan revitalisasi pasar masih dilakukan. Koordinasi antara Kantor Pengelolaan Pasar Daerah, Dinas Kebersihan Pasar, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan kepolisian masih selalu dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan terhadap pembeli. Setiap dinas yang terlibat dalam koordinasi memiliki tugas yang pada intinya adalah bertanggungjawab dalam pengelolaan pasar setelah revitalisasi.

Komunikasi atau koordinasi tidak hanya terjadi antar pihak-pihak instansi pemerintah tetapi juga dengan pihak-pihak di luar pemerintahan, yaitu investor. Komunikasi dengan organisasi di luar pemerintah terkait dengan pelaksanaan kebijakan dalam hal ini adalah meningkatkan fasilitas atau pelayanan terhadap masyarakat. Pihak investor berkoordinasi dengan pemerintah dalam upaya memberikan fasilitas baru yaitu bioskop 3D *movie*, karaoke *café*, *food court*, dan *play ground* yang bertujuan meningkatkan minat masyarakat pada pasar dengan tempat hiburan tersebut. Namun komunikasi yang dilakukan



antara Kantor Pengelolaan Pasar Daerah, dinas-dinas yang terkait serta investor sedikit disayangkan. Komunikasi yang terjalin sampai saat ini dalam upaya pengelolaan pasar tidak terjalin dengan baik bersama pedagang.

Komunikasi dengan pedagang terjalin dengan baik pada saat penataan pedagang setelah revitalisasi. Penataan dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar Daerah bersama paguyuban pedagang. Namun saat ini nampaknya komunikasi tersebut tidak terjadi lagi dengan baik. Hal ini terlihat karena tidak adanya kegiatan seperti penyuluhan yang diberikan pemerintah pada pedagang mengenai upaya meningkatkan minat masyarakat untuk berbelanja pada pedagang di dalam pasar. Sebagian pedagang pun beranggapan bahwa fasilitas yang diberikan terhadap pedagang sama saja dengan sebelum adanya revitalisasi pasar. Sehingga kebijakan revitalisasi pasar seperti memihak pada pedagang yang lebih memiliki modal.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar pada Pasar Legi

Kota Blitar

a. Faktor Internal Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dalam kebijakan, dan tentunya terdapat faktor-faktor baik internal ataupun eksternal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Terdapat banyak model guna menganalisis faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan

implementasi kebijakan. Salah satunya adalah model yang dikemukakan oleh George Edward III yang melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Edward dalam Widodo (2001:96-110) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition, and bureucratic structure*.

Model Implementasi George C. Edward III tersebut yaitu :

(1). Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementator*) (Widodo, 2009:97). Komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan revitalisasi pasar adalah antar institusi pemerintahan yaitu pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan pasar. Sebagai faktor pendukung implementasi kebijakan, komunikasi antar pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan pasar tetap dilakukan sampai dengan saat ini. Pihak-pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan revitalisasi pasar adalah antara Kantor Pengelolaan Pasar Daerah, Dinas

Kebersihan Pasar, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Kepolisian.

Komunikasi tidak hanya dilakukan dengan pelaksana kebijakan saja namun juga dengan kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Kelompok sasaran yang dimaksud adalah para pedagang melalui peguyupan pedagang yang terkait dengan penataan pedagang. Pihak yang terkait adalah pihak-pihak informal yaitu investor yang berkaitan dengan penambahan fasilitas umum di Pasar Legi.

(2). Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2001:98) mengemukakan bahwa:

“bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.”

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Dalam implementasi kebijakan revitalisasi pasar, sumber daya manusia yang

menjadi pendukung terlaksana implementasi sampai pada saat ini adalah para staff yang bekerja dalam institusi pemerintahan serta kelompok sasaran.

Para *staff* dalam setiap badan mampu berkoordinasi dalam mengelola pasar untuk mencapai tujuan kebijakan dan mengupayakan usaha untuk menarik pembeli. *Staff* merupakan pegawai instansi pemerintah yang berpengaruh dalam sistem mekanisme pasar. Sebagaimana yang dijelaskan Rachbini (2002:14) bahwa ilmu ekonomi politik yang konvensional menyadarkan analisisnya terhadap sistem kekuasaan di dalam suatu Negara, yang mungkin atau potensial memberikan ruang kebebasan atau tidak terhadap mekanisme pasar. Sehingga pegawai dari instansi pemerintah berwenang dalam mekanisme pasar.

Kelompok sasaran yaitu pedagang yang memiliki etika yang baik sehingga dapat membantu dalam memberikan pelayanan yang baik pada pedagang. Selain sumberdaya manusia, fasilitas yang telah ada juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Fisik bangunan pasar yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang mempermudah peningkatan fasilitas untuk pedagang dan pembeli, hal ini didukung pula dengan system transportasi yang teratur dan dilengkapi adanya angkutan umum.

b. Faktor Eksternal Pendukung Implementasi Kebijakan

Selain pendukung terlaksananya implementasi kebijakan yang berasal dari dalam lingkungan subyek maupun obyek kebijakan, faktor pendukung juga muncul dari lingkungan sekitar pasar. Edward dalam Widodo (2001:96-110) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition, and bureucratic structure*. Namun faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan kebijakan tidak berasal dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Faktor pendukung tersebut adalah sikap penduduk disekitar lingkungan Pasar Legi. Sikap penduduk sekitar yang mendukung revitalisasi Pasar Legi mengakibatkan proses peremajaan pasar berjalan dengan baik seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sarju selaku *staff* Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar bahwa:

“Saat pasar akan dibongkar dulu, penduduk sekitar lingkungan pasar bersikap baik, padahal penduduk sekitar merasakan dampak dari pembongkaran. Aktifitas penduduk kan jadi tidak berjalan seperti biasa, lalu lintas semrawut, namun penduduk tetap mendukung jalannya revitalisasi pasar. Sampai sekarang jika ada acara-acara pasar, anak-anak muda daerah sini masih suka bantu-bantu.” (Wawancara pada Tanggal 10 Juni 2013 pada Pukul 10.00 bertempat di Pos Keamanan Pasar Legi).

Dukungan yang ditunjukkan oleh penduduk sekitar pasar adalah dengan sikap masyarakat yang tidak menuntut atas pembongkaran pasar sebelum direvitalisasi membuat proses revitalisasi pasar berjalan dengan lancar. Penduduk sekitar pasar pada saat itu merasakan dampak dari

pembongkaran pasar seperti terganggunya aktifitas penduduk dan lalu lintas yang terganggu. Namun hal tersebut tidak membuat penduduk merasa sangat terganggu dengan jalannya revitalisasi.

Sampai pada saat ini, sikap masyarakat terhadap pengelolaan Pasar Legi masih terlihat mendukung. Penduduk sekitar pasar tidak segan membantu apabila ada acara yang terkait dengan Pasar Legi, hal tersebut ditunjukkan seperti keterlibatan penduduk dalam pemanfaatan lahan ex-terminal. Keterlibatan masyarakat tersebut juga ditunjukkan dengan sikap penduduk sekitar yang ikut menjaga kebersihan sekitar pasar sehingga kenyamanan pedagang dan pembeli tetap terpelihara.

Pada dasarnya faktor pendukung yang berpengaruh besar terhadap implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia yaitu staff yang harus mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan pasar dan kelompok sasaran yaitu para pedagang dan pembeli yang mampu memanfaatkan dengan baik fasilitas yang diberikan.

c. Faktor Internal Penghambat Implementasi Kebijakan

Edward dalam Widodo (2001:96-110) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition, and bureucratic structure*. Komunikasi yang menghambat keberhasilan implementasi adalah komunikasi antara pemerintah dengan para pedagang. Kurangnya interaksi pemerintah dengan pedagang mengakibatkan pedagang merasa

kesulitan dalam menarik pelanggan dan tidak adanya strategi yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kantor Pengelolaan Pasar Daerah kepada pedagang. Kurangnya komunikasi juga mengakibatkan kesenjangan pada pemerataan modal, hal ini ikut menghambat tujuan atau sasaran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pedagang.

Selain masalah komunikasi, hambatan keberhasilan implementasi juga terjadi pada kualitas sumber daya manusia yaitu kelompok sasaran. Kelompok sasaran yang dimaksud adalah para pedagang yang tidak memiliki inovasi untuk menarik pelanggan, tidak ada strategi khusus yang dilakukan oleh pedagang selain melayani pembeli dengan baik. Faktor anggaran yang merupakan bagian dari sumber daya turut menghambat implementasi kebijakan. Fasilitas penunjang yang telah mengalami kerusakan memerlukan dana untuk pengelolaannya. Namun pengelolaan ini nampaknya terganjal anggaran dari pemerintah.

d. Faktor Eksternal Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor eksternal yang menghambat implementasi kebijakan merupakan lingkungan. Lingkungan tersebut dapat berupa keadaan sosial-ekonomi, politik, dan dukungan publik. Dalam implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional ini, lingkungan sosial-ekonomi penduduk sekitar Pasar Legi menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Kondisi pendidikan penduduk sekitar yang kurang baik mengakibatkan keadaan ekonomi penduduk ikut menjadi kurang tercukupi.

Keadaan ekonomi yang kurang mencukupi kehidupan penduduk sekitar dengan kondisi pendidikan yang kurang baik mengakibatkan tingkat kriminalitas di lingkungan pasar meningkat. Hal ini mengakibatkan peningkatan keamanan terhadap pengunjung pasar menjadi terganggu. Selain masalah sosial, faktor eksternal yang menghambat implementasi kebijakan adalah munculnya toko-toko disekitar lingkungan pasar yang merupakan toko milik penduduk sekitar pasar. Munculnya toko-toko di lingkungan Pasar Legi mengakibatkan semakin ketatnya persaingan antara pedagang dalam Pasar Legi. Persaingan antar pedagang dalam pasar untuk mendapatkan pembeli ditambah dengan munculnya toko-toko di lingkungan Pasar Legi mengakibatkan pencapaian tujuan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan pedagang semakin sulit dicapai.

Faktor penghambat yang mengakibatkan kebijakan sulit untuk mencapai sasaran dalam penelitian ini adalah aksesibilitas pedagang dan pembeli adalah kurang adanya komunikasi serta perhatian pemerintah terhadap pedagang yang kurang diminati oleh pembeli. Mengenai fasilitas penunjang, hambatan terjadi pada anggaran guna mengelola fasilitas penunjang dalam pasar yang mulai tidak dapat digunakan dengan baik.

3. Hasil Evaluasi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Legi Terhadap Aksesibilitas Pedagang dan Pembeli

a. Dampak Kebijakan

Kebijakan yang telah ditentukan selalu diharapkan dapat mencapai sasaran atau tujuan yang memang telah ditargetkan. Untuk mencapai sasaran yang tepat tentunya implementasi kebijakan tersebut menimbulkan dampak, dan dampak tersebut dapat menjadi dampak yang baik maupun dampak yang merugikan banyak pihak. Dengan melihat dampak yang terjadi akan dapat diketahui apakah kebijakan yang ditetapkan efisien atau tidak. Untuk mengetahui efisien atau tidak kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah diperlukan tahapan akhir dari kebijakan publik yaitu evaluasi kebijakan.

Menurut Abidin (2006: 211) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu evaluasi awal sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (*ex-ante evaluation*), evaluasi dalam proses pelaksanaan atau *monitoring*, evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*). Dalam penelitian mengenai revitalisasi pasar ini, evaluasi yang digunakan adalah *ex-post evaluation* yaitu evaluasi yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya Wibawa (1994: 9-10) mengemukakan bahwa :

“Evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 aspek yaitu proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi terhadap aspek implementasi disebut evaluasi implementasi sedangkan evaluasi terhadap aspek konsekuensi dan efektivitas dampak disebut evaluasi dampak kebijakan.”

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Wibawa, evaluasi dampak kebijakan revitalisasi pasar ini merujuk pada evaluasi terhadap aspek

konsekuensi dan efektifitas dampak yang disebut dengan evaluasi dampak kebijakan sehingga diperoleh kesimpulan apakah kebijakan revitalisasi telah efektif dalam meningkatkan fasilitas yang layak untuk pedagang dan pembeli. Untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan revitalisasi tersebut, maka perlu dievaluasi dampak-dampak kebijakan tersebut sebagai berikut:

a. Dampak Individu

Pedagang merupakan salah satu bagian penting dalam pasar. Oleh karena itu pedagang menjadi salah satu tujuan dari kebijakan revitalisasi pasar. Tujuan kebijakan revitalisasi pasar yang berkaitan dengan pedagang adalah untuk memberikan fasilitas yang lebih baik terhadap pasar sehingga terdapat peningkatan pendapatan terhadap pedagang. Evaluasi dampak terhadap pedagang ini berkenaan dengan apakah kebijakan revitalisasi pasar telah mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

Tujuan revitalisasi pasar untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas umum terhadap pedagang dan meningkatkan pendapatan pedagang nampaknya belum tepat sasaran. Dengan revitalisasi pasar, tidak semua pedagang merasakan peningkatan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Pedagang dengan modal yang belum terlalu besar mendapatkan kios dengan ukuran $3 \times 4 \text{ m}^2$ dan terletak di dalam pasar, hal ini mengakibatkan pedagang kurang mendapatkan perhatian dari pembeli. Hal ini dirasakan oleh pedagang lama yang telah berdagang di Pasar Legi semenjak pasar belum mengalami peremajaan, para pedagang merasa dengan kebijakan revitalisasi pasar mereka mengalami penurunan pendapatan dikarenakan

semakin banyaknya persaingan. Penambahan jumlah pedagang mengakibatkan persaingan dagang yang ketat dan tidak diikuti adanya strategi-strategi dari pedagang untuk menarik pembeli.

Peremajaan bangunan atau revitalisasi terhadap Pasar Legi memberikan dampak yang kurang baik terhadap pedagang dengan modal yang kurang besar, berbeda halnya dengan pedagang yang memiliki modal besar. pedagang dengan modal yang mencukupi merasakan fasilitas yang diberikan dengan revitalisasi pasar. Semakin mudahnya pedagang menarik pelanggan atau pembeli dirasakan oleh pedagang dengan kios yang lebih besar dengan ukuran 6 x 8,4 m² yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan yang lebih baik. Selain itu kios tersebut terletak di bagian depan pasar sehingga mudah diperhatikan oleh pelanggan. Sehingga terjadi perbedaan dampak dari revitalisasi pasar yang dirasakan oleh pedagang dengan modal yang cukup besar dengan pedagang modal yang kurang besar.

Melihat dampak kebijakan revitalisasi pasar dari sisi pedagang, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efisien untuk kalangan pedagang. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pedagang dengan modal yang belum cukup besar mengakibatkan pedagang tersebut kurang merasakan adanya fasilitas baru yang diberikan pemerintah untuk pedagang meskipun fasilitas-fasilitas tersebut telah nyata dibangun oleh pemerintah.

b. Dampak Masyarakat

Masyarakat berperan penting dalam perekonomian terutama dalam pasar. Masyarakat berperan sebagai pembeli yang ikut menggerakkan roda perekonomian dalam pasar, oleh karena itu masyarakat baik sebagai pembeli maupun penduduk yang bertempat tinggal di lingkungan sekitar pasar tentu merasakan dampak dari kebijakan revitalisasi pasar.

Masyarakat sebagai pembeli menjadi salah satu tujuan dimana kebijakan revitalisasi pasar diimplementasikan. Salah satu tujuan peremajaan pasar adalah untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan terhadap masyarakat. Fasilitas tersebut saat ini diwujudkan dengan adanya bangunan pasar yang lebih luas, bersih dan terang, serta ditambah dengan beraneka ragam jenis dagangan dari pedagang. Terwujudnya fasilitas tersebut juga diikuti dengan bertambahnya jumlah pedagang sehingga pembeli semakin memiliki pilihan dalam berbelanja. Selain itu melalui revitalisasi terwujud beberapa fasilitas penunjang yang diberikan untuk menambah kenyamanan pembeli, fasilitas tersebut yaitu radio pasar, musholla, MCK, CCTV, informasi dan keamanan yang sampai saat ini masih dapat dimanfaatkan oleh pembeli.

Masyarakat sebagai pembeli banyak yang merasa nyaman untuk berbelanja di pasar setelah revitalisasi. Hal ini dikarenakan bangunan pasar sekarang lebih luas, bersih dan dilengkapi fasilitas parkir yang luas. Sebagaimana yang dirasakan oleh penduduk di sekitar pasar yang merasakan perubahan dari peremajaan pasar. Dengan adanya pasar setelah

revitalisasi, masyarakat sekitar pasar merasakan bahwa lingkungannya juga menjadi bersih. Selain dalam hal kebersihan masyarakat juga mendapatkan lapangan pekerjaan sebagai tukang parkir dengan adanya revitalisasi.

Kebijakan revitalisasi pasar pada Pasar Legi memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kebijakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas kepada pembeli sudah tepat sasaran karena pembeli memang sudah merasa nyaman dengan fasilitas yang diberikan pada Pasar Legi saat ini. Tidak hanya pembeli, masyarakat sekitar lingkungan pasar juga merasakan dampak positif dari kebijakan revitalisasi pasar. Hal itu terwujud dari keadaan lingkungan sekitar pasar yang menjadi lebih bersih dan adanya lapangan kerja baru untuk masyarakat.

c. Dampak Organisasi

Organisasi bukan merupakan tujuan dari kebijakan revitalisasi pasar, namun tanpa adanya organisasi kebijakan tidak dapat berjalan. Organisasi di sini adalah instansi pemerintahan yang bertujuan menggerakkan dan melaksanakan program-program dari kebijakan.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:145), menjelaskan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas dan program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau sejenis keluaran yang nyata (tangible output). Sehingga implementasi mencakup beberapa macam kegiatan. Pertama, badan-badan

pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang menjalankan program, bertanggung jawab untuk menyediakan sumber-sumber yang diperlukan, untuk implementasi program tersebut. Sumber-sumber tersebut meliputi personil, peralatan, lahan tanah dan terutama dana (uang). Kedua, badan-badan pelaksana membuat rencana-rencana kegiatan dan regulasi agar program menjadi suatu arahan yang kongkrit. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka, menciptakan unit-unit birokrasi untuk menjalankan kegiatan yang telah direncanakan.

Badan pelaksana yang dimaksud oleh Replay dan Franklin tersebut adalah instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks kebijakan revitalisasi pasar ini berdampak pula pada organisasi atau instansi pemerintah. Dampak tersebut terjadi pada Dinas Pendapatan Daerah yaitu dinas yang sebelum adanya kebijakan revitalisasi pasar berwenang dalam pengelolaan pasar. Setelah kebijakan revitalisasi pasar terimplementasi, Dinas Pendapatan Daerah tidak lagi berwenang terhadap pasar. Kewenangan Pasar Legi selanjutnya diserahkan pada Kantor Pengelolaan Pasar Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah diubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikhususkan untuk mengelola kas daerah.

d. Dampak Fisik

Dari semua dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan revitalisasi pasar, dampak fisik merupakan dampak nyata. Dampak fisik merupakan

bangunan pasar yang mengalami peremajaan. Fisik pasar merupakan bagian dari fasilitas yang diperbaharui dengan revitalisasi pasar. Kebijakan revitalisasi pasar yang telah diimplementasikan merubah total fisik Pasar Legi yang sebelumnya dirasa pemerintah sudah tidak memadai, gelap, kotor dan tidak tertata menjadi bangunan permanen yang bersih, luas, tertata dan lebih terang.

Pasar Legi setelah revitalisasi nampaknya memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan yaitu meningkatkan fasilitas dan pelayanan untuk pembeli dan meningkatkan kualitas fasilitas untuk pedagang. Peremajaan pasar melalui kebijakan revitalisasi pasar benar-benar merubah fisik Pasar Legi yang sebelumnya dirasa sudah tidak memadai sekarang menjadi pasar induk dan pusat distribusi yang dapat dinikmati oleh segala segi masyarakat baik dari dalam Kota Blitar atupun luar Kota Blitar.

Berdasarkan hasil atau keluaran dari implementasi kebijakan yaitu dampak-dampak yang muncul setelah kebijakan diimplementasikan maka dapat diketahui efektifitas dari kebijakan. Terdapat dampak positif yaitu dampak yang diharapkan dari implementasi kebijakan serta dampak negative yaitu dampak yang tidak diharapkan dari implementasi kebijakan. Dampak positif terhadap aksesibilitas pedagang dan pembeli adalah tercapainya sasaran kebijakan yaitu peningkatan pelayanan dan fasilitas penunjang terhadap pembeli, hal ini terbukti dengan nyamannya pembeli berbelanja di pasar setelah revitalisasi. Pedagang dengan kios dibagian muka pasar juga

merasakan fasilitas penunjang dari revitalisasi pasar yaitu keadaan kios yang lebih terang dan menarik minat pembeli lebih mudah.

Dampak negatif yang timbul adalah pembeli dengan modal yang tidak besar merasa bahwa kebijakan revitalisasi pasar tidak memberikan perubahan, fasilitas penunjang yang diberikan tidak memberikan kemudahan pedagang mendapatkan pembeli. Dengan revitalisasi pasar pedagang tersebut merasa semakin sulit mendapatkan atau menarik minat pembeli. Hal itu bertolak belakang dengan tujuan dari kebijakan revitalisasi pasar. Dengan munculnya dampak negatif tersebut diketahui bahwa Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional pada Pasar Legi Kota Blitar belum efektif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan revitalisasi Pasar Legi telah berjalan sejak tahun 2004. Dalam implementasi tersebut Kantor Pengelolaan Pasar Daerah bekerjasama dengan peguyupan pedagang dalam proses penataannya. Selanjutnya Kantor Pengelolaan Pasar Daerah berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Pasar, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta Kepolisian untuk mengelola pasar. Koordinasi juga dijalin dengan investor dalam upaya menambah fasilitas umum berupa bioskop 3D *movie*, *karaoke café*, *food court*, serta *play ground*.
2. Dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar tradisional terdapat faktor pendukung dan penghambat. Dalam menjalankan program-program kebijakan revitalisasi pasar tradisional, sumberdaya manusia merupakan faktor pendukung yang terutama. *Staff* yaitu para pegawai dalam instansi pemerintah yang saling terkoordinir dapat berkoordinasi dengan baik

dalam melaksanakan tugasnya. Pedagang yang memiliki etika sehingga mudah diatur oleh Kantor Pengelolaan Pasar Daerah sebagai kelompok sasaran juga mendukung terlaksanakannya kebijakan revitalisasi pasar tradisional dan diikuti sikap penduduk sekitar yang mendukung revitalisasi

pasar. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar tradisional adalah sulitnya menjalin komunikasi dengan kelompok sasaran yaitu pedagang sehingga pedagang dengan modal yang tidak besar sulit untuk menarik pelanggan, diikuti dengan munculnya toko-toko milik penduduk yang berada di sekitar lingkungan Pasar Legi yang menimbulkan persaingan pedagang semakin ketat. Selain itu anggaran guna memperbaiki fasilitas yang mulai rusak juga menjadi hambatan dalam mencapai sasaran kebijakan.

3. Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Blitar menimbulkan dampak pada aksesibilitas pedagang dan pembeli. Pedagang merupakan salah satu bagian dari sasaran kebijakan revitalisasi pasar. Setelah revitalisasi pasar berlangsung dan Pasar Legi baru diresmikan pada tahun 2004, pedagang telah merasakan dampak dari kebijakan revitalisasi pasar tradisional ini. Pedagang dengan modal besar merasa revitalisasi ini membuat mereka semakin nyaman berjualan, fasilitas kios yang lebih luas, memiliki tempat strategis, dan dengan penerangan yang lebih baik mempermudah pedagang menarik pembeli. Sedangkan pedagang dengan modal yang tidak terlalu besar tidak cukup merasa perubahan pasar.

Mereka merasa setelah revitalisasi persaingan dagang semakin ketat yang menimbulkan mereka sulit untuk menarik pelanggan, selain itu fasilitas yang diberikan pemerintah melalui revitalisasi tidak jauh berbeda dengan fasilitas yang ada sebelum pasar direvitalisasi. Kebijakan revitalisasi pasar tradisional yang telah merubah Pasar Legi menjadi pasar semi modern membawa dampak positif pada pembeli. Dengan Pasar Legi setelah revitalisasi pembeli merasa nyaman berbelanja di pasar yang sekarang karena pasar menjadi lebih bersih, lebih terang, lebih aman, dan jumlah pedagang yang semakin banyak membuat pembeli menjadi lebih puas dalam memilih. Pembeli telah menikmati fasilitas penunjang baru yang diberikan Pemerintah Kota Blitar melalui Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional. Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional ini belum cukup dikatakan sebagai kebijakan yang tepat sasaran. Meskipun pembeli merasakan bahwa Pasar Legi menjadi pasar yang lebih nyaman untuk berbelanja, namun belum efektifnya kebijakan revitalisasi pasar tradisional ini ditunjukkan dengan keluhan para pedagang dengan modal yang tidak besar yang merasa bahwa kebijakan tersebut mengakibatkan mereka sulit mendapatkan pembeli. Kebijakan ini lebih memihak pada pedagang dengan modal yang lebih besar.

4. Pelaksanaan Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional pada Pasar Legi Kota Blitar dilaksanakan oleh aktor-aktor dari instansi pemerintahan yaitu Pengelola Pasar Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan Pasar, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian Kota Blitar yang selalu berkoordinasi

dalam mencapai sasaran kebijakan yaitu peningkatan pelayanan dan fasilitas penunjang kepada pedagang dan pembeli di dalam Pasar Legi. Dengan revitalisasi pasar, keadaan pasar semakin luas, terang, bersih dan didukung dengan adanya fasilitas penunjang baru yang menambah kenyamanan bagi pedagang dan pembeli. Dalam pelaksanaan kebijakan terdapat hambatan yaitu sulitnya menjamin komunikasi dengan pedagang. Sedangkan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan adalah sumberdaya manusia yaitu *staff* dari instansi pemerintah yang mampu berkoordinasi dalam mengelola pasar. Namun Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional belum dapat dikatakan efektif karena masih timbul dampak negatif dari revitalisasi yaitu pedagang dengan modal kecil yang merasa semakin sulit mendapatkan minat pembeli setelah revitalisasi pasar.

B. Saran

Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional memberikan dampak yang positif bagi pembeli dan pedagang dengan modal besar dan memberikan dampak negatif terhadap pedagang dengan modal yang tidak besar. Untuk itu, peneliti mengajukan saran untuk mempertahankan dampak positif yang ditimbulkan dan mengurangi dampak negatif dari implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Dalam koordinasi, hendaknya pemerintah melalui kantor pengelolaan pasar berkerjasama dengan investor yang mampu bekerjasama dalam

meningkatkan minat pembeli terhadap pasar, sehingga investor tidak hanya bekerjasama untuk menguntungkan salah satu pihak.

2. Sulitnya pedagang dalam menarik pelanggan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Untuk itu pemerintah melalui Kantor Pengelolaan Pasar Daerah perlu mengadakan pertemuan dengan pedagang guna menampung keluhan pedagang dan selanjutnya memberikan penyuluhan tentang inovasi atau strategi khusus dalam menarik pelanggan.
3. Kurangnya minat pembeli pada lantai dua pasar dan bagian dalam pasar mengakibatkan pedagang merasa bahwa kebijakan revitalisasi pasar membuat mereka kehilangan pembeli. Untuk itu perlu adanya inovasi yang dapat menarik pembeli. Hal itu dapat dilakukan dengan memberikan area khusus di lantai dua dan dalam/tengah pasar untuk para pedagang makanan yang biasa berdagang di area parkir. Selain untuk menarik pembeli hal ini juga efektif untuk menata pedagang kaki lima yang masih berjualan di sekitar tempat parkir.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional dan membantu dalam upaya peningkatan minat pembeli pada Pasar Legi Kota Blitar.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zaenal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Athilla. 2011. "Aksesibilitas". Melalui <http://www.athidanalyst.blogspot.com> (26/12/12)
- BPS. 2009. *Kota Blitar Dalam Angka 2009*. Blitar: BPS Kota Blitar.
- Deliarnov. 2005. *Ekonomi Politik*. Jakarta : Erlangga.
- Dwijowijoto, N.R. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Islamy, Irfan M. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Krutwaysho, Orotai, 2003. "Obstacles to The Implementation of Tourism Policies and Regulations in Phuket Thailand". *School of Sport and Leisure Management, Sheffield Hallam University*, 1-16.
- Legowo, Martinus, *et al.* "Pedagang dan Revitalisasi Pasar Tradisional di Surabaya: Studi Kasus pada Pasar Wonokromo dan Pasar Tambah Rejo, Surabaya". *Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Surabaya*.

Peraturan Daerah Kota Blitar No. 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kota Blitar Tahun 2001-2010

Pujiasih. 2009. *“Factors affecting effectiveness of policy implementation: A case of Market Legi revitalization program in Blitar Municipality Indonesia”*. Melalui <http://www.etd.ugm.ac.id> (10/01/13)

Rachbini, Didik J. 2002. *Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Santana, Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryono, Agus. 2006. *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang: UM Press.

Tjiptono, Fandy. 2004. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996 *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Samudro, *et al.*, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

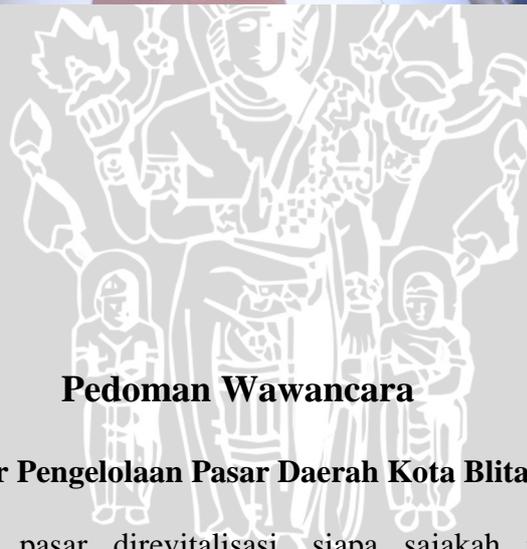


Foto Pasar Legi









Pedoman Wawancara

A. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota Blitar

1. Setelah pasar direvitalisasi, siapa sajakah pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan pasar? Apakah ada instansi atau pihak non formal?
2. Apakah kondisi pasar saat ini sudah sesuai dengan harapan pemerintah?
3. Dalam penataan pedagang, apakah ada keterkaitan antara Pengelolaan Pasar dengan pihak lain?

4. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari revitalisasi?
5. Faktor pendukung implementasi kebijakan revitalisasi apa saja?
6. Faktor penghambat implementasi kebijakan revitalisasi apa saja?
7. Tindakan seperti apa yang dilakukan untuk mengatasi banyaknya kios kosong?
8. Upaya untuk meramaikan kios-kios pada lantai 2 seperti apa?
9. Pedagang di ex-terminal apakah masuk dalam pengelolaan pasar?
10. Komunikasi seperti apa yang dilakukan antara pengelolaan pasar dengan pedagang?

B. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kota

Blitar

1. Apa sajakah fasilitas penunjang dalam Pasar Legi setelah revitalisasi?
2. Apa sajakah jenis dagangan dalam Pasar Legi?
3. Berapakah jumlah pedagang lama dan pedagang baru dalam Pasar Legi?
4. Berapakah jumlah pedagang pada masing-masing jenis dagangan?
5. Bagaimanakah system penyewaan kios dalam Pasar Legi?

C. Pedagang

1. Sejak kapan pedagang berjualan?
2. Apakah fasilitas yang diberikan pemerintah melalui peremajaan pasar dirasakan oleh pedagang?

3. Bagaimana berjualan setelah pasar diremajakan? mudah sekarang atau dulu?

D. Pembeli

1. Apakah setelah pasar diremajakan berbelanja jadi lebih nyaman?
2. Apa sajakah yang menyebabkan berbelanja di pasar yang sekarang menjadi lebih nyaman?
3. Apa yang menyebabkan pembeli malas untuk berbelanja di lantai 2?
4. Apa yang menyebabkan pembeli tertarik belanja di pasar?

